



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025



BKIPM BALIKPAPAN



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan (LKj) Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai KIPM Balikpapan dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Laporan ini menguraikan informasi terkait pencapaian kinerja, kendala dan upaya harus dilakukan dalam rangka pencapaian target Tahun 2025.



Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai KIPM Balikpapan Tahun 2025. Secara umum target indikator kinerja yang ditetapkan pada periode Triwulan I tahun 2025 telah dicapai sesuai target yang ditetapkan. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai KIPM Balikpapan di masa mendatang.

Ungkapan terimakasih kepada seluruh pihak dan jajaran pegawai Balai KIPM Balikpapan yang telah membantu dan mendukung pencapaian kinerja Balai KIPM Balikpapan Triwulan I tahun 2025.

Kami menyadari laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu saran, tanggapan maupun masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya.



Balikpapan, 11 April 2025
Kepala Balai KIPM Balikpapan

Eko Sulystianto

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG.....	9
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	10
1.3 STRATEGI ORGANISASI	12
1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 VISI DAN MISI.....	14
2.2 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.....	15
2.3 PENGUKURAN KINERJA	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 CAPAIAN KINERJA.....	19
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI	21
3.3 REALISASI ANGGARAN.....	37
3.4 EFISIENSI ANGGARAN.....	39
BAB IV. PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN	41
4.2 REKOMENDASI	42
LAMPIRAN	43

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025.....	7
Tabel 2. Target Indikator Kinerja Kegiatan BKIPM Balikpapan Triwulan I Tahun 2025.....	17
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja BKIPM Balikpapan Triwulan I Tahun 2025.....	21
Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2025	22
Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2025	27
Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2025.....	29
Tabel 7. Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	35
Tabel 8. Nilai Rata-rata (NRR) Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat.....	36
Tabel 9. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2025.....	38
Tabel 10. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025.....	38

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi BKIPM Balikpapan	11
Gambar 2. Peta Strategis BKIPM Balikpapan Tahun 2025	16
Gambar 3. Dashboard Capaian IK dan IKU Pada Sistem Aplikasi Kinerja Tahun 2025	19
Gambar 4. Kegiatan Inspeksi CPIB dan CBIB di Pembudidayaan Ikan.....	23
Gambar 5. Kegiatan Inspeksi Penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan	25
Gambar 6. Tangkap Layar Aplikasi SIDAK Triwulan I Tahun 2025.....	33
Gambar 7. Tangkap Layar Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2025 Pada Website https://ptsp.kkp.go.id/skm/	37
Gambar 8. Tangkap Layar Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan I Pada Website https://spanint.kemenkeu.go.id/	39

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) BKIPM Balikpapan Triwulan I Tahun 2025 mencerminkan hasil pencapaian selama periode tersebut. Penilaian atas tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja BKIPM Balikpapan Triwulan I Tahun 2025 diukur dengan membandingkan target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada tiap perspektif yang relevan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BKIPM Balikpapan Tahun 2025 untuk mencapai kondisi yang diinginkan sebagai suatu *outcome / impact* dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kegiatan BKIPM Balikpapan selama Triwulan I Tahun 2025.

Pada tahun 2025 Balai KIPM Balikpapan mempunyai 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025. Pengukuran atas pencapaian kinerja dilakukan secara triwulanan, semester dan tahunan. Pencapaian atas target indikator kinerja menjadi Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan pada periode Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 113.70 % dengan kategori istimewa, sama kategori capaian Triwulan I Tahun 2024. Nilai ini diperoleh berdasarkan pencapaian sasaran kegiatan dan target Indikator Kinerja Kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja kegiatan Balai KIPM Balikpapan pada periode Triwulan I tahun 2025 sudah tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 14 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2025, terdapat 6 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori pencapaian memenuhi atau melebihi target dan 8 Indikator Kinerja yang belum memiliki realisasi pada Triwulan I, karena target pencapaian dilakukan per semester atau tahunan.

Uraian Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori pencapaian memenuhi atau melebihi target adalah sebagai berikut :

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan
3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup BKIPM Balikpapan
4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan

5. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BKIPM Balikpapan
6. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup BKIPM Balikpapan

Uraian Indikator Kinerja Kegiatan yang belum memiliki nilai capaian pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup BKIPM Balikpapan
2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup BKIPM Balikpapan
3. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan
4. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup BKIPM Balikpapan
5. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BKIPM Balikpapan
6. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Balikpapan
7. Penilaian mandiri SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan
8. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup BKIPM Balikpapan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun 2025			
			Target Tahunan	Target TW. I	Realisasi TW. I	%
SK 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan						
IK 1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan	%	70	70	100	120
IK 2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan	%	70	70	110	120
IK 3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup BKIPM Balikpapan	%	99	99	100	101.01

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan		Tahun 2025
------	----------------------------	--	------------

		Satuan	Target Tahunan	Target TW. I	Realisasi TW. I	%
Lanjutan SK 2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang konsisten sesuai standar						
IK 4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup BKIPM Balikpapan	%	75	-	-	-
IK 5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup BKIPM Balikpapan	%	75	-	-	-
SK 3. Tatakelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan						
IK 6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	92	-	-	-
IK 7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	71.5	-	-	-
IK 8	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BKIPM Balikpapan	%	100	-	-	-
IK 9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Balikpapan	Indeks	87	-	-	-
IK 10	Penilaian mandiri SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan	Indeks	86	-	-	-
IK 11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan	%	85	85	100	117.65
IK 12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BKIPM Balikpapan	%	76	76	100	120
IK 13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup BKIPM Balikpapan	%	70	-	-	-
IK 14	Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	88	88	91.11	103.53

Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2025 Lingkup BKIPM Balikpapan

KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

Capaian Kinerja keuangan Balai KIPM Balikpapan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I telah terealisasi sebesar Rp. 1.080.398,462,- atau sebesar 17.05 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.337.937.000,-. Anggaran Balai KIPM Balikpapan tahun 2025 mengalami pemblokiran anggaran sebesar Rp. 1.677.363.000,-. Namun pemblokiran anggaran ini tidak mempengaruhi capaian kinerja Balai KIPM Balikpapan Triwulan I tahun 2025, hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja organisasi sebesar 113.70 %, dimana kegiatan masih tetap terlaksana dengan baik dengan anggaran yang tersedia.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai KIPM Balikpapan merupakan salah satu UPT BPPMHKP-Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusidan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi Balai KIPM Balikpapan. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Balai KIPM Balikpapan serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Balikpapan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d) Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengujian mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
- d. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh produk hasil kelautan dan perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- e. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- f. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, Kepala Balai KIPM Balikpapan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai KIPM Balikpapan sejumlah 19 pegawai, 1 orang PPPK, 8 orang PPNPN dan 4 orang PJLP. ASN di BKIPM Balikpapan terdiri dari 2 pegawai pejabat struktural, 2 pegawai fungsional umum, 9 pegawai fungsional inspektur mutu, 2 pegawai fungsional arsiparis, 3 pegawai fungsional keuangan dan 1 pegawai fungsional BMN. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk *workforce* yang efektif dan efisien.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Balikpapan

1.3. STRATEGI ORGANISASI

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Balai KIPM Balikpapan dengan indikator dan target yang terukur. Aspek strategis tersebut dijabarkan melalui Sasaran Kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Meningkatkan ekspor produk perikanan dengan pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan ditangkap sampai di ekspor ke negara tujuan.

Penjaminan keberterimaan produk perikanan di Negara tujuan dilakukan melalui pemenuhan standar mutu dan keamanan dari sektor produksi primer dan sektor produksi pasca panen, pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI dan pemenuhan standar produk sesuai persyaratan negara tujuan, sehingga produk perikanan yang diekspor diterima di negara tujuan ekspor.

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar

Peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan selain melalui pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan, juga dilakukan melalui pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi.

Sasaran Kegiatan 3 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif dan terpercaya melalui penyediaan data dan informasi yang baik, benar dan akurat, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan serta melakukan inovasi guna peningkatan kinerja dan mengevaluasi pelayanan kinerja melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal-hal lainnya

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan visi dan misinya yaitu :

Visi : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong

Misi :

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilen, pengambilan contoh, pengujian dan monitoring
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kebutuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, Balai KIPM Balikpapan sebagai UPT dari BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) misi KKP dalam Renstra 2020-2025, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2025, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai KIPM Balikpapan sebagai UPT BKIPM turut bertanggungjawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

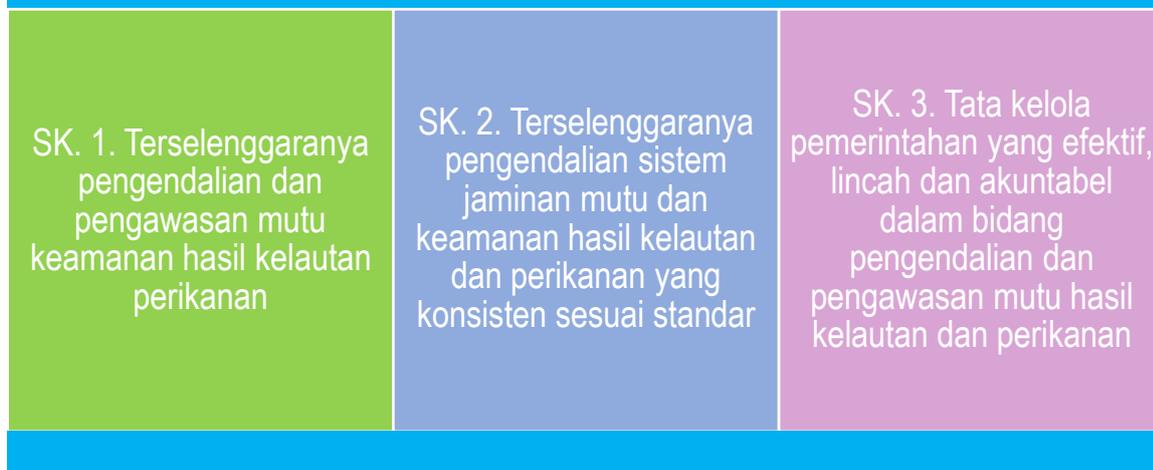
1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

2.2. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja Balai KIPM Balikpapan tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 2. dan Tabel 2. dibawah ini.

PETA STRATEGIS BKIPM BALIKPAPAN TAHUN 2025



Gambar 2. Peta Strategis BKIPM Balikpapan Tahun 2025

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan I
IKK. 1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan	%	70	70
IKK. 2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan	%	70	70
IKK. 3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup BKIPM Balikpapan	%	99	99
IKK. 4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	75	-
IKK. 5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	75	-
IKK. 6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	92	-

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan I
IKK. 7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	71.5	-
IKK. 8	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	100	-
IKK. 9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Balikpapan	Indeks	87	-
IKK. 10	Penilaian mandiri SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	86	-
IKK. 11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	85	85
IKK. 12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	76	76
IKK. 13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	70	-
IKK. 14	Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	88	88

Tabel 2. Target Indikator Kinerja Kegiatan BKIPM Balikpapan Triwulan I Tahun 2025

2.3. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah

berbeda, sebagaimana penjelasan berikut :

a. Polarisasi Maximize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi lebih tinggi dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Minimize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{1 + (1 - \text{Realisasi/Target})\} \times 100\%$$

c. Polarisasi Stabilize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

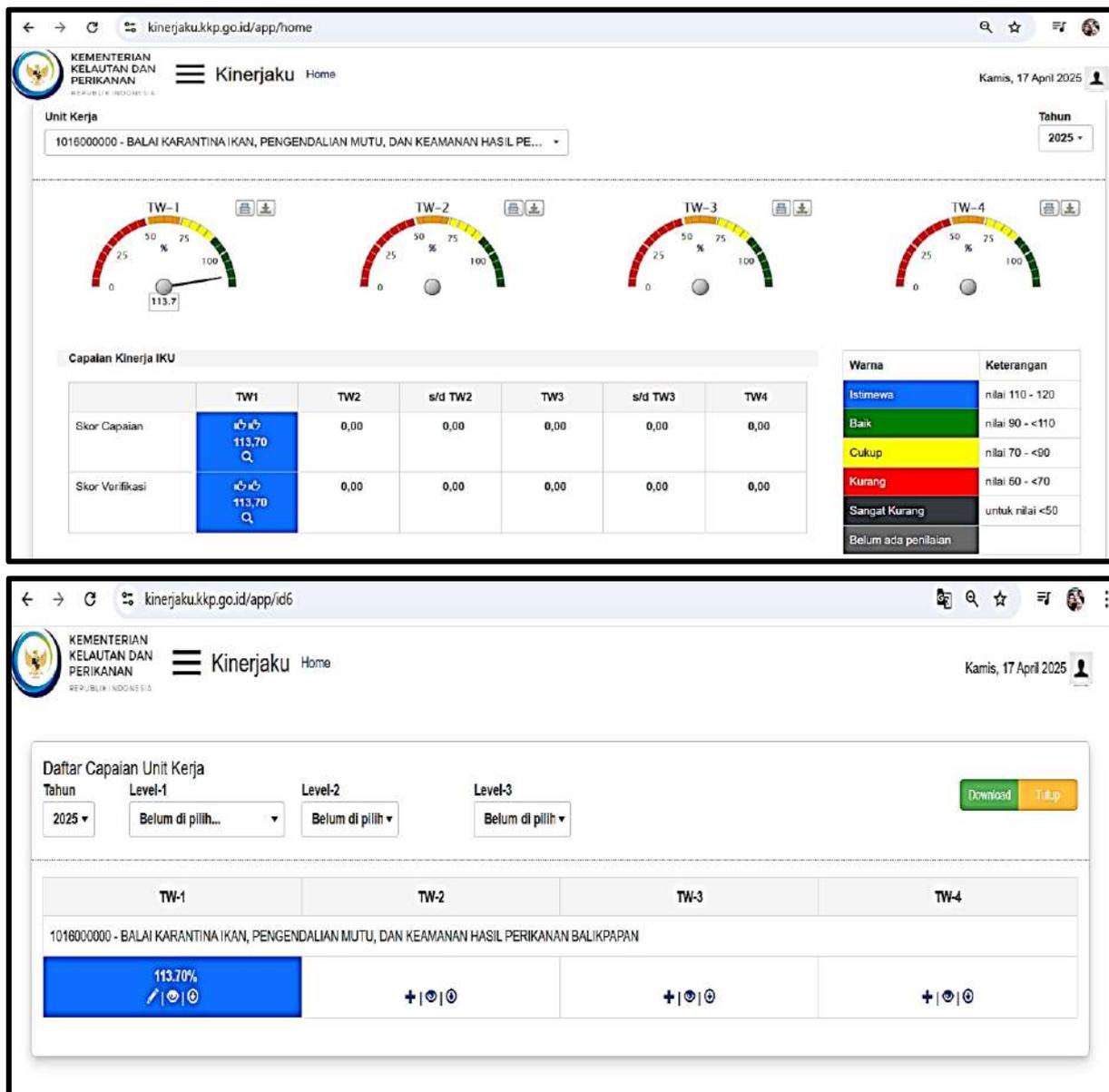
4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

BIRU	HIJAU	KUNING	MERAH	HITAM
110 - 120	90 - < 110	70 - < 90	50 - < 70	< 50
Istimewa	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Secara umum target kinerja Balai KIPM Balikpapan pada Triwulan I tahun 2025 telah tercapai, hal ini ditandai dengan Nilai Capaian Organisasi (NKO) sebesar 110.76% dengan kategori istimewa, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di <https://kinerjaku.kkp.go.id>



Gambar 3. Dashboard Capaian IK dan IKU pada Sistem Aplikasi Kinerjaku

Nilai capaian kinerja merupakan gambaran nilai kinerja Balai KIPM Balikpapan secara keseluruhan. Nilai capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 sebesar 113,70 %, capaian ini lebih rendah dari capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 113,95 %.

Rekapitulasi capaian kinerja Balai KIPM Balikpapan Triwulan I tahun 2025 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 3.

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun 2025		
			Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	%
SK 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif					
IKK. 1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan	%	70	100	120
IKK. 2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan	%	70	110	120
IKK. 3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup BKIPM Balikpapan	%	99	100	101.01
SK 2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif					
IKK. 4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	-	-	-
IKK. 5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	-	-	-
SK 3. Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Lingkup BPPMHKP					
IKK. 6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	-	-	-
IKK. 7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	-	-	-
IKK. 8	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	-	-	-
IKK. 9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Balikpapan	Indeks	-	-	-

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun 2025		
			Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	%
IKK. 10	Penilaian mandiri SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	-	-	-
IKK. 11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	85	85	100
IKK. 12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	76	99.06	120
IKK. 13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	-	-	-
IKK. 14	Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	88	91.11	105.53

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja BKIPM Balikpapan Triwulan I Tahun 2025

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detail berdasarkan indikator kerjanya serta dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra Balai KIPM Balikpapan, adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2025. Nilai capaian kegiatan Balai KIPM Balikpapan untuk sasaran kegiatan 1 pada Triwulan I tahun 2025 tersebut adalah 113,67 %.

Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif adalah :

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar

- mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan.
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan.
 3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup BKIPM Balikpapan.

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029	
		Realisasi Triwulan I	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	(%)	Target	(%)
SK 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan							
IKK. 1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan	-	70	100	120	70	120
IKK. 2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan	-	70	110	120	70	120
IKK. 3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup BKIPM Balikpapan	-	99	100	101.01	99	101.01

Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

IKK. 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan

Dalam mendukung kegiatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari hulu sampai hilir, maka dilakukan sertifikasi terhadap produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer budidaya meliputi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) dan dari perikanan tangkap meliputi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di kapal.

Sektor produksi perikanan primer merujuk pada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi sektor produksi primer dilakukan berdasarkan permohonan yang masuk pada sistem OSS maupun secara manual. Selama triwulan I tahun 2025, terdapat 2 jenis sertifikasi sektor produksi primer yaitu Sertifikasi CPIB dan CBIB pada pembudidayaan ikan.



Gambar 4. Kegiatan Inspeksi CPIB dan CBIB di Pembudidayaan Ikan

Capaian indikator kinerja persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan terhitung dari jumlah sertifikat yang diterbitkan (CPIB, CBIB, CPPIB, CPOIB dan CDOIB) dibagi dengan jumlah jenis sertifikasi. Capaian indikator kinerja persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sampai dengan periode Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 100 % atau 120 % dari target sebesar 70 %.

IKK. 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan

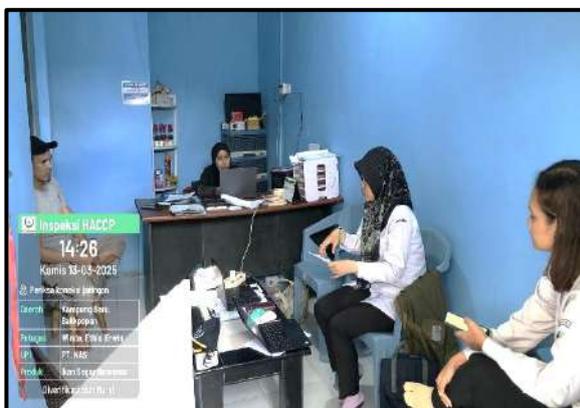
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi : sertifikasi PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar serta kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan diterapkan melalui pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar Internasional (Codex Alimentarius), dan standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.





Gambar 5. Kegiatan Inspeksi Penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan

Capaian indikator kinerja persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan perhitungannya berdasarkan persentase jumlah UPI yang menerapkan HACCP dan Program Kelayakan Dasar (GMP-SSOP) dengan jumlah parameter yang dinilai. Pada Triwulan I Tahun 2025, capaian kegiatan persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sebesar 110 % atau 120 % dari target sebesar 70 %.

IKK. 4. Rasio Ekspor Ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup BKIPM Balikpapan

Sertifikat Mutu dan Keamanan hasil Perikanan (SMKHP) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah SMKHP yang terbit) dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak ada kasus penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Indikator rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor diukur dari jumlah SMKHP yang diterbitkan oleh BKIPM Balikpapan dibagi dengan jumlah SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan dengan melampirkan notifikasi penolakan kasus / penolakan SMKHP. Realisasi indikator kinerja rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor pada periode Triwulan I tahun 2025 sebesar 100 % dengan persentase 101.01 % dari target yang ditetapkan pada Triwulan I tahun 2025 sebesar 99 %.

Tercapainya realisasi rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merupakan komitmen bersama antara Balai KIPM Balikpapan dan stakeholder dalam rangka memenuhi jaminan mutu dan melengkapi persyaratan ekspor dari negara tujuan sesuai dengan amanat perundang-undangan.

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten dan Sesuai Standar

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2025. Sasaran kegiatan 2 lingkup BKIPM Balikpapan Triwulan I tahun 2025 belum memiliki nilai capaian karena capaiannya dilakukan secara tahunan.

Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten dan sesuai standar yaitu :

1. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup BKIPM Balikpapan.
2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup BKIPM Balikpapan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029	
		Realisasi Triwulan 	Target Triwulan 	Realisasi Triwulan 	(%)	Target	(%)
SK 2. Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar							
IKK. 4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	70	-
IKK. 5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	70	-

Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

IKK. 4. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup BKIPM Balikpapan

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 : 2017 serta dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

Perhitungan capaian indicator kinerja nilai kualitas sistem manajemen mutu laboratorium lingkup BKIPM Balikpapan Tahun 2025 dilakukan secara tahunan.

IKK. 5. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup BKIPM Balikpapan

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap Lembaga inspeksi dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020 : 2012 dan dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa lembaga inspeksi telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Perhitungan capaian indikator kinerja nilai kualitas sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi lingkup BKIPM Balikpapan Tahun 2025 dilakukan secara tahunan.

Sasaran Kegiatan 3 : Tatakelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2025. Nilai capaian sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan lingkup Balai KIPM Balikpapan periode Triwulan I tahun 2025 tersebut adalah 113,73 %. Indikator kinerja kegiatan yang memiliki nilai capaian pada triwulan I untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah :

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan
2. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BKIPM Balikpapan
3. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup BKIPM Balikpapan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029	
		Realisasi Triwulan I	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	(%)	Target	(%)
SK. 3. Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Lingkup BKIPM Balikpapan							
IKK. 6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	92	-
IKK. 7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	71.5	-
IKK. 8	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	100	-
IKK. 9	Indeks Professional ASN lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	87	-
IKK. 10	Penilaian mandiri SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	86	-
IKK. 11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan	80	85	100	117.65	85	117.65
IKK. 12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BKIPM Balikpapan	-	76	100	120	76	120
IKK. 13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	70	-
IKK. 14	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BKIPM Balikpapan	84	88	91.11	103.53	88	103.53

Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

IKK. 6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari

sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output satker didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Pencapaian nilai IKPA berdasarkan ketaatan pada 8 indikator yaitu revisi DIPA, Deviasi RPD, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan capaian output.

Perhitungan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai KIPM Balikpapan Tahun 2024 dilakukan per semester sehingga pada Triwulan I Tahun 2025 belum memiliki nilai capaian.

IKK. 8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BKIPM Balikpapan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kategori opini terhadap laporan keuangan Kementerian / lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu :

SKALA	OPINI
5	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
4	WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
3	WDP : Wajar Dengan Pengecualian
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Keterangan : Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya

Perhitungan capaian indikator persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Balikpapan Tahun 2024 dilakukan per tahun sehingga pada Triwulan I Tahun 2025 belum memiliki nilai capaian.

IKK. 9. Indeks Profesional ASN Lingkup BKIPM Balikpapan

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Perhitungan capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Balikpapan tahun 2024 dilakukan setiap semester sehingga pada Triwulan I Tahun 2025 belum memiliki nilai capaian.

IKK. 10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BKIPM Balikpapan

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rekonsiliasi kinerja merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu :

1. Aspek kepatuhan : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ / LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ / LCK TW III
2. Aspek kesesuaian : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan

kesesuaian informasi data.

3. Aspek ketercapaian : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata- rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2024 pada aplikasi kinerjaku

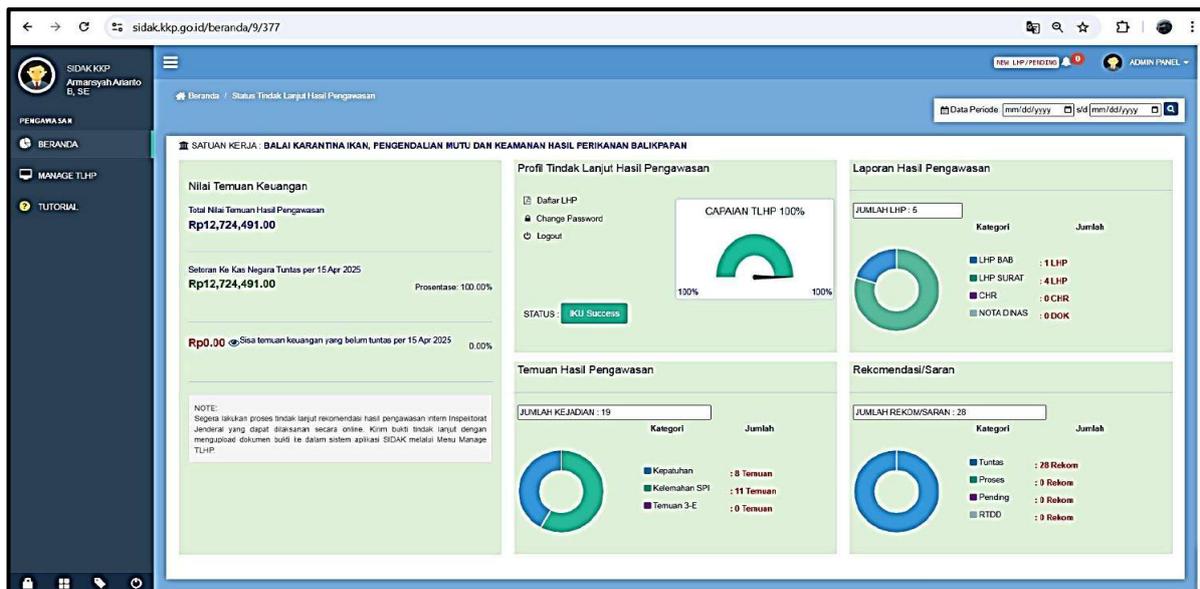
Perhitungan capaian indikator kinerja nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Balikpapan Tahun 2024 dilakukan secara tahunan sehingga pada Triwulan I Tahun 2025 belum memiliki nilai capaian.

IKK. 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Balikpapan

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal Balai KIPM Balikpapan yang sudah ditindaklanjuti (proses dan / atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan dengan pengukuran target kumulatif tahunan sebesar 85 % pada tahun 2025.

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Balikpapan adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Balai KIPM Balikpapan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2024 s/d Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Satker yang menjadi objek pengawasan. Pengecualian apabila tidak terdapat temuan dari Inspektorat Jenderal Mitra, maka capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Level II sesuai dengan *capture dashboard* pada Aplikasi SIDAK.

Capaian indikator kinerja presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai KIPM Balikpapan pada periode Triwulan I tahun 2024 adalah 100 % dari target sebesar 85 %, yang diperoleh dari *capture dashboard* pada Aplikasi SIDAK KKP.



Gambar 6. Tangkap Layar Aplikasi SIDAK Triwulan I Tahun 2025

IKK. 12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup BKIPM Balikpapan

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Target yang ditetapkan untuk capaian indikator kinerja persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BKIPM Balikpapan adalah 76 % sedangkan pengukurannya dilakukan setiap triwulan. Capaian indikator ini pada triwulan I tahun 2025 sebesar 100 % berdasarkan penyampaian Nota Dinas dari Sekretariat

Jendral KKP Nomor 2/SJ.7/TU.140/IV/2025 tanggal 14 April 2025

IKK. 13. Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup BKIPM Balikpapan

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang PEMBANGUNAN Integritas di Lingkungan KKP.

Nilai pembangunan integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

- a. Pembangunan zona integritas (bobot 30 %)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15 %)
- c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15 %)
- d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15 %)
- e. Pelaporan harta kekayaan (LHKAN) (bobot 15 %)
- f. Pengendalian kecurangan (bobot 10%)

Perhitungan capaian indikator kinerja persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona itegritas lingkup Balai KIPM Balikpapan Tahun 2025 dilakukan per semester.

IKK. 14. Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Lingkup BKIPM Balikpapan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat / pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, biaya jasa pelayanan, produk pelayanan, kecepatan respon dari aplikasi sistem pelayanan, kemudahan

dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan, kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan dan layanan konsultasi dan pengaduan. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari UPT lingkup BKIPM.

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing- masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

IKM	=	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Unsur Yang Terisi}}$	X Nilai Penimbang Total
------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

Untuk memudahkan interpretasi penilaian SKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

SKM Unit Pelayanan x 25

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,532 - 4,00	88,31 -100,00	A	Sangat Baik

Tabel 7. Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 91.11 maka kinerja unit pelayanan ini

berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena masih berada dalam Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Internal konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 88.31 - 100.00. Capaian Indikator Kinerja nilai kepuasan masyarakat terhadap proses layanan dari Balai KIPM Balikpapan sampai dengan Triwulan I tahun 2024 sebesar 91.11 atau dengan persentase sebesar 103.53 % dari target yang ditetapkan yaitu 88. Dibandingkan capaian Triwulan I tahun 2024 dengan nilai 98.16, capaian indikator kinerja Survey Kepuasan Masyarakat layanan publik lingkup BKIPM Balikpapan periode Triwulan I tahun 2024 memiliki capaian yang lebih meningkat.

No.	Unsur SKM	Nilai Rata-rata
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3.66
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3.64
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan	3.64
4	Kesesuaian biaya jasa pelayanan	3.64
5	Kesesuaian produk pelayanan	3.64
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh / unggah) dari aplikasi sistem pelayanan	3.63
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan	3.66
8	Kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan	3.64
9	Layanan konsultasi dan pengaduan	3.64
Rata-rata		3.64

Tabel 8. Nilai Rata-rata (NRR) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Dari hasil analisa hasil Survey Kepuasan Masyarakat dapat diketahui bahwa :

- a. Unsur layanan terendah yang didapatkan adalah kompetensi pelayanan dengan nilai capaian 3.64
- b. Unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu persyaratan dan perilaku pelaksana dengan nilai capaian 3.66

Rencana tindak lanjut untuk unsur yang memiliki capaian nilai terendah dilakukan melalui rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan waktu layanan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, dan kendala pada aplikasi SIAP MUTU) serta

melakukan refreshment pelatihan pelayanan public bagi petugas pelayanan yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2025. Kualitas pelayanan perlu terus ditingkatkan terutama unsur pelayanan yang memperoleh nilai lebih rendah, agar nilai SKM yang diperoleh dapat dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan untuk pelanggan / stakeholder.

The screenshot shows a web interface for 'Susan KKP' with a sidebar menu and a main content area titled 'Laporan SKM Detail'. The main area includes filters for 'Triwulan 1' and '2025', a 'Submit' button, and a 'Download Data' button. Below the filters, there is a table with the following data:

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bkipm	Balai KIPM Balikpapan	2025	1	4.97	91.11	70

The page also indicates '50 Data terakhir Tw 1/2025, untuk selengkapnya silahkan download data dalam bentuk excel' and 'Showing 1 to 1 of 1 entries'.

Gambar 7. Tangkap Layar Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2025 Pada Website <https://ptsp.kkp.go.id/skm>

3.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Balikpapan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 6.337.937.000,- serta pemblokiran anggaran sebesar Rp. 1.677.363.000,-, sehingga alokasi anggaran yang bisa digunakan setelah blokir adalah Rp. 4.660.574.000,-. Penyerapan anggaran Balai KIPM Balikpapan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah Rp. 1.080.398,462,- atau sebesar 17.05 % dari pagu anggaran yang tersedia.

Anggaran ini digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Hal ini dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,70 %, dimana

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) ini merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Rekapitulasi penyerapan anggaran Balai KIPM Triwulan I tahun 2025 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan dapat dilihat pada Tabel 8. dan Tabel 9 dan Gambar 12.

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	3.496.071.000	738.795.959	21.13
2	Belanja Barang	2.841.866.000	241.602.503	12.02
3	Belanja Modal	0	0	0
	Total	6.337.937.000	1.080.398.462	17.05

Tabel 9. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2025

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Pengendalian Mutu	225.000.000	12.787.332	5.68
2	Manajemen Mutu	175.000.000	-	0
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP	5.937.937.000	1.067.611.130	17.98
	Total	6.337.937.000	1.080.398.462	17.05

Tabel 10. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	SEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER	
1	567610 BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	PAGU	3,496,071,000	2,841,866,000	0	0	0	0	0	0	0	6,337,937,000
		REALISASI	738,795,959 (21.13%)	341,602,503 (12.02%)	0 (0.00%)	1,080,398,462 (17.05%)						
		SISA	2,757,275,041	2,500,263,497	0	0	0	0	0	0	0	5,257,538,538
GRAND TOTAL		PAGU	3,496,071,000	2,841,866,000	0	0	0	0	0	0	0	6,337,937,000
		REALISASI	738,795,959 (21.13%)	341,602,503 (12.02%)	0 (0.00%)	1,080,398,462 (17.05%)						
		SISA	2,757,275,041	2,500,263,497	0	0	0	0	0	0	0	5,257,538,538

Gambar 8. Tangkap Layar Realisasi Anggaran BKIPM Balikpapan Sampai Dengan Triwulan I 2025 Pada Website spanint.kemenkeu.go.id

3.4. EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Balai KIPM Balikpapan telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan SDM dan waktu kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas.. Kebijakan terkait efisiensi anggaran tersebut, mendorong Balai KIPM Balikpapan untuk lebih efisien dan fokus dalam pelaksanaan tugas fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan namun tetap menjaga kualitas kinerja.

Berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan pada Triwulan I tahun 2025, penyerapan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan Triwulan I Tahun 2025 telah tercapai dengan adanya dukungan Anggaran DIPA BKIPM Balikpapan Tahun 2025.

2. Sebanyak enam (enam) kegiatan yang merupakan target pada Triwulan I memiliki capaian melebihi target, dengan dukungan anggaran yang tersedia.
3. Capaian realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan OMSPAN adalah Rp. 1.080.398,462,- atau sebesar 17.05 % dari pagu anggaran Rp. 6.337.937.000,-.

BAB. IV. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Balikpapan Triwulan I tahun 2025 menyajikan capaian sasaran strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja Balai KIPM Balikpapan Tahun 2025. Capaian tersebut dilakukan perbandingan terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya dan juga target Renstra 2025 - 2029 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan berikutnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BKIPM Balikpapan Triwulan I tahun 2025 dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

1. Nilai capaian indikator kinerja Balai KIPM Balikpapan periode Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 113,70 % yang dapat dilihat pada aplikasi kinerjaku di <https://kinerjaku.kkp.go.id/>
2. Pencapaian kinerja Balai KIPM Balikpapan periode Triwulan I tahun 2025 sangat baik dengan diperolehnya Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,70 % pada aplikasi kinerjaku.
3. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I tahun 2025, sebanyak 6 indikator kinerja capaiannya telah melebihi target.
4. Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Balikpapan pada Triwulan I tahun 2025 mencapai Rp. 1.080.398,462,- atau sebesar 17.05 % dari pagu anggaran Rp. 6.337.937.000,-.
5. Untuk meningkatkan nilai efisiensi pada triwulan berikutnya maka Balai KIPM Balikpapan perlu melakukan optimalisasi dan efisiensi sumberdaya dengan memaksimalkan sumberdaya manusia, waktu kerja dan anggaran kegiatan.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dan evaluasi kinerja Balai KIPM Balikpapan pada Triwulan I tahun 2025 sebagai upaya untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan memanfaatkan data realisasi triwulan sebelumnya sebagai dasar pemenuhan target triwulan berikutnya. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran diintegrasikan dengan pemenuhan target kinerja, sehingga dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja;
2. Melakukan perbaikan / tindak lanjut terhadap aspek-aspek yang dinilai kurang pada pelaksanaan kegiatan;
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik dan terstruktur agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien;
4. Laporan pencapaian kinerja ini digunakan sebagai dasar perencanaan kinerja triwulan berikutnya, sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan kinerja berorientasi hasil yang lebih optimal.

LAMPIRAN

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK)
BALAI KIPM BALIKPAPAN**

NAMA INDIKATOR : PERSENTASE HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PRIMER YANG MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LINGKUP UPT BKIPM BALIKPAPAN

NAMA TIMJA : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PRODUKSI PRIMER

PERIODE LAPORAN : TRIWULAN I / 2025

Nama Sasaran Kegiatan		: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan							
Nama Indikator Kinerja		: Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan							
T / R	Tahun 2025							Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2025
	Q1	Q2	SM. 1	Q3	Q4	SM. 2	Tahunan		
Target	70%								70 %
Realisasi	100%								
% Capaian	120%								

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4
 SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2
 SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4
 Tahunan : Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya ?)

Pusat pengendalian dan pengawasan mutu produk primer mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu produk sumber daya kelautan, penangkapan ikan dan pembudidayaan. Sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan, yang pada gilirannya melahirkan tuntutan terhadap jaminan keamanan, mutu dan kesehatan bahan makanan yang dikonsumsi termasuk komoditas kelautan dan perikanan. Untuk menjawab tantangan pasar Internasional berupa persyaratan mutu dan keamanan produk hasil kelautan dan perikanan yang semakin berkembang, baik dalam metodologi serta berkembangnya nilai tambah. Dengan demikian sebagai negara produsen hasil kelautan dan perikanan kesigapan untuk mampu menanggulangi bahkan mengantisipasi hambatan dalam kegiatan ekspor hasil perikanan Indonesia yang mampu memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sejak proses produksi, pengolahan, sampai distribusi.

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

1. Perubahan organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, terjadi perubahan yang semula dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan, sehingga diperlukan sosialisasi terhadap stakeholder pada organisasi baru. Di negara berkembang masalah keamanan pangan

banyak disebabkan oleh kurangnya praktik sanitasi yang baik serta kurangnya kesadaran terhadap pentingnya sanitasi.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pada BPPMHKP kurang memadai

3. Anggaran pelaksanaan kegiatan

Efisiensi pemanfaatan anggaran berimbang pada tugas dan fungsi yang diampu

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target, jika tidak tercapai apa yang menjadi akar masalah (Mengapa hal tersebut terjadi ?)

1. Capaian indikator diperoleh dengan menghitung persentase pelaksanaan sertifikasi CPIB ditambah dengan persentase pelaksanaan sertifikasi CBIB, dibagi dengan jumlah dari unsur pembentuk (2) dikali 100 %
2. Capaian indikator dihitung setiap triwulan
3. Realisasi terhadap IKU Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup BKIPM Balikpapan sebesar 100 % berdasarkan data sebagai berikut :

- Sertifikasi CPIB (A)
 - a. Target sertifikasi CPIB di pembudidaya ikan sebanyak 3 produk
 - b. Realisasi sertifikasi CPIB di pembudidaya ikan sebanyak 3 produk atau sebesar 100 %
- Sertifikasi CBIB di Unit Pembenihan Ikan (B)
 - a. Target sertifikasi CBIB di unit pembenihan ikan sebanyak 1 produk
 - b. Realisasi sertifikasi CBIB sebanyak 1 produk atau sebesar 100 %
- Berdasarkan data persentase sertifikasi CPIB dan sertifikasi CBIB tersebut maka capaian untuk IKU persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar 100 %.

$$\begin{aligned} \% X &= \frac{A + B}{xn} \times 100 \\ &= \frac{100 + 100}{2} \times 100 \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto / dokumentasi

1. Melaksanakan Sertifikasi CPIB di UPTD Bontang secara onsite



2. Melaksanakan Sertifikasi CBIB di Kab.Paser secara remote assesment



Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan sosialisasi tentang tugas dan fungsi yg terkait dengan pusat pengendalian dan pengawasan sektor produksi primer terutama pada layanan sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB) dan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal 2. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan / diklat 	<p>Timja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Primer</p>

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
<p>Koordinasi dengan pelaku usaha terkait pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam proses sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) berjalan dengan baik sehingga capaian indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 dapat terpenuhi</p>	<p>Timja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Primer</p>



Balikpapan, 10 April 2025
Kepala Balai KIPM Balikpapan

Eko Sulystianto

**SERTIFIKASI HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PRIMER
YANG MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN**

Nama UPT : Balai KIPM Balikpapan
Periode / Tahun : Triwulan I Tahun 2025

No.	Jenis Sertifikasi	Nama Unit Pembenhian	Alamat	Peringkat / Grade	Jenis Produk / Ruang Lingkup	Nomor Sertifikat	Tanggal Inspeksi	Masa Berlaku Sertifikat	Keterangan
1	CPIB	UPTD Balai Benih Ikan Tanjung Laut Indah	Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang - Kalimantan Timur	Sangat Baik	Benih Ikan Lele	ID-CPIB-T-64-250023	03-04 Maret 2025	24 Maret 2025 - 24 Maret 2029	Baru
2	CPIB	UPTD Balai Benih Ikan Tanjung Laut Indah	Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang - Kalimantan Timur	Sangat Baik	Benih Ikan Nila	ID-CPIB-T-64-250024	03-04 Maret 2025	24 Maret 2025 - 24 Maret 2029	Baru
3	CPIB	UPTD Balai Benih Ikan Tanjung Laut Indah	Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang - Kalimantan Timur	Sangat Baik	Benih Ikan Gurame	ID-CPIB-T-64-250025	03-04 Maret 2025	24 Maret 2025 - 24 Maret 2029	Baru
4	CBIB	Abd. Azis, H	Sunge Batu, Desa Sunge Batu, Kec. Paser Belengkong, Kab. Paser - Kalimantan Timur	Baik	Ikan Bandeng	ID-CBIB-P-64-250014	21 Februari 2025	28 Februari 2025 - 28 Februari 2029	Baru



Balikpapan, 10 April 2025

Kepala,

[Signature]
Eko Sulystianto

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK)
BALAI KIPM BALIKPAPAN**

NAMA INDIKATOR : PERSENTASE HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PASCA PANEN YANG MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN

NAMA TIMJA : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PASCA PANEN

PERIODE LAPORAN : TRIWULAN I / 2025

Nama Sasaran Kegiatan		: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan							
Nama Indikator Kinerja		: Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup BKIPM Balikpapan							
T / R	Tahun 2025							Capaian	Target
	Q1	Q2	SM. 1	Q3	Q4	SM. 2	Tahunan	Tahun 2025	Tahun 2025
Target	70%								70%
Realisasi	110%								
% Capaian	120%								

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4

SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2

SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan : Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya ?)

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada :
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah

Terdapat isu utama yaitu :

1. Dalam rangka pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan melalui pembinaan dan pengendalian, pembinaan dan pengendalian tersebut dilakukan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Kondisi saat ini, DJPDSPKP tidak memberikan anggaran ke pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, hal ini dapat berimplikasi terhadap capaian IKU sertifikasi SKP
2. Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa Dan / Atau Hasil Perikanan menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Perubahan tentang semua hasil perikanan yang keluar dari wilayah Republik Indonesia baik untuk konsumsi maupun non konsumsi wajib disertai dengan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) sehingga pelaku usaha wajib memiliki Sertifikat HACCP sebagai salah satu persyaratan untuk pengiriman produk ke negara tujuan

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target, jika tidak tercapai apa yang menjadi akar masalah (Mengapa hal tersebut terjadi ?)

1. Capaian indikator diperoleh dengan menghitung persentase penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk ditambah dengan persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMP SSOP, dibagi dengan jumlah dari unsur pembentuk (2) dikali 100 %
2. Capaian indikator dihitung setiap triwulan
3. Realisasi terhadap IKU Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup BKIPM Balikpapan sebesar 110 % berdasarkan data sebagai berikut :
 - Sertifikasi HACCP di UPI (A)
 - a. Target penerapan HACCP di UPI sebanyak 1 produk
 - b. Realisasi penerapan HACCP di UPI sebanyak 1 produk atau sebesar 100 %
 - Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) di UPI (B)
 - a. Target sertifikasi SKP hasil kelautan dan perikanan di UPI skala UMKM dan menengah besar sebanyak 1 produk
 - b. Realisasi SKP yang diterbitkan sebanyak 12 produk atau sebesar 120 %
 - Berdasarkan data persentase sertifikasi HACCP dan sertifikasi SKP tersebut maka capaian untuk IKU Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 110 %

$$\begin{aligned}
 \% X &= \frac{A + B}{xn} \times 100 \\
 &= \frac{100 + 120}{2} \times 100 \\
 &= 110 \%
 \end{aligned}$$

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto / dokumentasi

1. Melakukan pengendalian penerapan jaminan mutu di Unit Pengolahan Ikan (UPI) melalui kegiatan inspeksi penerapan HACCP. Kegiatan inspeksi dilakukan pada Bulan Maret 2025 pada 1 UPI dengan 1 ruang lingkup produk



2. Pelaksanaan sertifikasi pelaksanaan GMP dan SSOP di UPI dan UMKM melalui pemenuhan dokumen-dokumen pendukung melalui website SKP Online

SKP ONLINE											
Data SKP Terbit											
#	Nama UPI	Produk ID	Produk EN	No. Seri	No. SKP	Tgl Terbit	Rank	Alamat	Provinsi	Status/ID/NO Izin OSS	
1	HENNY ERNAWATI FARM	Pompek Ikan	Fish Pompek	37400	35332641/SKP/1/1/2025	23-01-2025	6	JL. PONTIANAK 7, KEL. KELURAHAN TELUKAN, KEC. KECAMATAN BONTINGE BARAT, Kota Bontang Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	Ditetapkan ID: 1-20241204123451230930101 NO: 912000231016600010001	SKP Produk OSS Inspekti
2	PT. SUBELEAN SNACK INDONESIA	Amplang Ikan	Fish Amplang	37351	35283641/SKP/1/1/2025	17-01-2025	6	Perumahan Sumbang Permai Jl. Catur VII Blok A No.17 KEDAT, KEC. Kalarahan Api - Ayu, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	Ditetapkan ID: 1-20241204123451230930101 NO: 912010078285100000004	SKP Produk OSS Inspekti
3	PT. NUSAYBAH	Ikan Demersal Segar (Cakap Putih, Kerapu BIKIK, Kerapu Kaseke, Kawaha	Fresh Demersal Fish (Baramundi, Dusky Groupet, Groupet, Kaseke, Parotopi, Poahot, Red Sweeper	37306	35238641/SKP/1/1/2025	14-01-2025	6	Jalan 21 Januari No. 217, Kec. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat,	Kalimantan Timur	Ditetapkan ID: 1-202402181056319668431/ NO:	SKP Produk OSS

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah maupun Dinas Kab / Kota untuk kegiatan pembinaan jaminan mutu di UMKM dan UPI sebagai kegiatan pendukung sertifikasi SKP dan HACCP

Penanggung Jawab

Timja Pengendalian dan Pengawasan Pasca Panen

2. Peningkatan kompetensi inspektur mutu melalui pelatihan / diklat penjaminan mutu	
-------------------------------------------------------------------------------------	--

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Koordinasi dengan pelaku usaha terkait pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam proses sertifikasi SKP dan HACCP berjalan dengan baik sehingga capaian indicator kinerja pada triwulan I tahun 2025 dapat terpenuhi.	Timja Pengendalian dan Pengawasan Pasca Panen



Balikpapan, 10 April 2025
Kepala Balai KIPM Balikpapan

Eko Sulystianto

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PASCA PANEN
YANG MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN

Nama UPT : Balai KIPM Balikpapan
Periode / Tahun : Triwulan I / 2025

No.	Jenis Sertifikasi	Nama UPI	Alamat	Peringkat / Grade	Jenis Produk / Ruang Lingkup	Nomor Sertifikat	Tanggal Inspeksi	Masa Berlaku Sertifikat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	HACCP	PT. Nusaybah Alby Saing	Jl. 21 Januari RT. 47 Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur	B	Fresh Demersal Fish	276/PM/HACCP/PS/03/25	13 Maret 2025	19 Maret 2025 - 19 Maret 2027	Baru



Balikpapan, 10 April 2025
Kepala Balai KIPM Balikpapan,

Eko Sulystianto

**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PASCA PANEN
YANG MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN**

Nama UPT : Balai KIPM Balikpapan
Periode / Tahun : Triwulan I / 2025

No.	Jenis Sertifikasi	Nama UPI	Alamat	Peringkat / Grade	Jenis Produk / Ruang Lingkup	Nomor Sertifikat	Tanggal Terbit Sertifikat	Masa Berlaku Sertifikat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	SKP	Dahliya A	Jl. Teritip Laut RT. 42 SIKT (Sentra Industri Kecil) Blok A-16, Kel. Teritip, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	B	Fish Amplang	36031/64/SKP/LN/III/2025	10 Maret 2025	10 Maret 2025 - 10 Maret 2027	
2	SKP	Henny Ernawati Fam	Jl. Pontianak 7, Kelurahan Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur	B	Fish Pempek	35332/64/SKP/LN/II/2025	22 Januari 2025	22 Januari 2025 - 22 Januari 2027	
3	SKP	PT. Qisbelian Snack Indonesia	Perumahan Bontang Permai. Jl. Catur VII Blok A No. 17 RT. 07, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Kalimantan Timur	B	Fish Amplang	35283/64/SKP/LN/II/2025	17 Januari 2025	17 Januari 2025 - 17 Januari 2027	
4	SKP	CV. Tiga A	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	A	Live Snail	35234/64/SKP/LN/II/2025	14 Januari 2025	14 Januari 2025 - 14 Januari 2025	
5	SKP	CV. Tiga A	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	A	Live Grouper	35233/64/SKP/LN/II/2025	14 Januari 2025	14 Januari 2025 - 14 Januari 2025	
6	SKP	CV. Tiga A	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	A	Live Lobster	35232/64/SKP/LN/II/2025	14 Januari 2025	14 Januari 2025 - 14 Januari 2025	
7	SKP	CV. Tiga A	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	A	Live Eel	35231/64/SKP/LN/II/2025	14 Januari 2025	14 Januari 2025 - 14 Januari 2025	
8	SKP	CV. Tiga A	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	A	Live Shell	35230/64/SKP/LN/II/2025	14 Januari 2025	14 Januari 2025 - 14 Januari 2025	

No.	Jenis Sertifikasi	Nama UPI	Alamat	Peringkat / Grade	Jenis Produk / Ruang Lingkup	Nomor Sertifikat	Tanggal Inspeksi	Masa Berlaku Sertifikat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
9	SKP	CV. Tiga A	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	A	Live Crab	35235/64/SKP/LN/2025	14 Januari 2025	14 Januari 2025 - 14 Januari 2025	
10	SKP	PT. Nusaybah Alby Saing	Jalan 21 Januari RT. 047, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	B	Fresh Demersal Fish	35238/64/SKP/SG/2025	14 Januari 2025	14 Januari 2025 - 14 Januari 2025	
11	SKP	PT. Nusaybah Alby Saing	Jalan 21 Januari RT. 047, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	B	Fresh Pelagic Fish	35237/64/SKP/SG/2025	14 Januari 2025	14 Januari 2025 - 14 Januari 2025	
12	SKP	PT. Nusaybah Alby Saing	Jalan 21 Januari RT. 047, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	B	Fresh Shrimp	35236/64/SKP/SG/2025	14 Januari 2025	14 Januari 2025 - 14 Januari 2025	



Balikpapan, 10 April 2025
 Kepala Balai KIPM Balikpapan,

Eko Sulystianto

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK)
BALAI KIPM BALIKPAPAN**

NAMA INDIKATOR : RASIO EKSPOR DAN HASIL PERIKANAN YANG DITERIMA OLEH NEGARA TUJUAN EKSPOR LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN
 NAMA TIMJA : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PASCA PANEN
 PERIODE LAPORAN : TRIWULAN I / 2025

Nama Sasaran Kegiatan		: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan							
Nama Indikator Kinerja		: Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor							
T / R	Tahun 2025							Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2025
	Q1	Q2	SM. 1	Q3	Q4	SM. 2	Tahunan		
Target	99%								99%
Realisasi	100%								
% Capaian	101%								

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4
 SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2
 SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4
 Tahunan : Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya ?)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

1. Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa Dan / Atau Hasil Perikanan menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari Wilayah Negara Republik

Indonesia. Perubahan tentang semua hasil perikanan yang keluar dari wilayah Republik Indonesia baik untuk konsumsi maupun non konsumsi wajib disertai dengan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)

2. Perubahan aplikasi sertifikasi ekspor dari SISKARIN menjadi SIAP MUTU
3. Pengiriman produk dan hasil perikanan ke negara mitra memerlukan nomor registrasi

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target, jika tidak tercapai apa yang menjadi akar masalah (Mengapa hal tersebut terjadi ?)

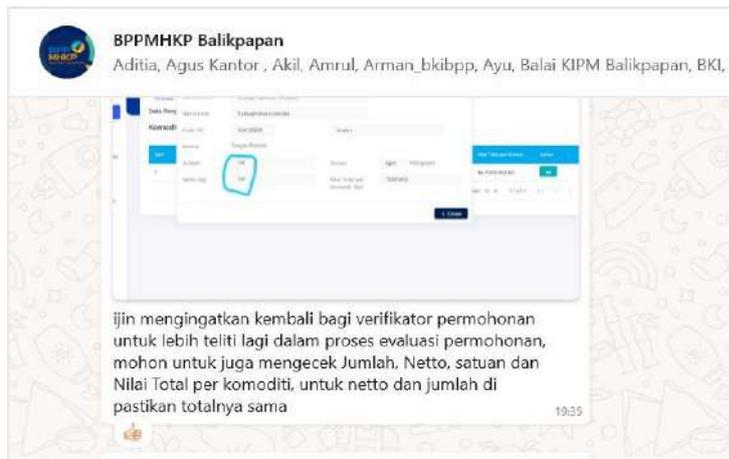
1. Capaian indikator diperoleh dengan menghitung jumlah SMKHP yang diterbitkan oleh BKIPM Balikpapan dikurangi jumlah SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan dibagi dengan jumlah sertifikat ekspor yang diterbitkan oleh BKIPM Balikpapan
2. Capaian indikator dihitung setiap triwulan
3. Realisasi terhadap IKU rasio ekspor dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor sebesar 100 % berdasarkan data sebagai berikut :
 - a. Jumlah SMKHP yang diterbitkan oleh BKIPM Balikpapan selama Januari – Maret 2025 sebanyak 339 SMKHP
 - b. Tidak ada kasus penolakan produk di negara tujuan ekspor selama Januari – Maret 2025

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto / dokumentasi

1. Melakukan pengendalian dan pengawasan penerapan jaminan mutu di Unit Pengolahan Ikan (UPI) melalui kegiatan surveilen penerapan HACCP sebagai penjaminan mutu produk yang akan diekspor ke negara tujuan. Kegiatan surveilen dilakukan pada Bulan Januari 2025 pada 6 UPI dan 1 UPI tidak melakukan proses produksi sehingga tidak dilakukan surveilen HACCP (dilengkapi dengan surat pernyataan dari UPI)



2. Melakukan komunikasi dengan petugas verifikator permohonan sertifikasi ekspor melalui whatsapp group untuk mengingatkan kembali pentingnya melakukan pemeriksaan dokumen maupun data dukung lainnya sebelum SMKHP dicetak



3. Penyampaian informasi terkini kepada pelaku usaha melalui whatsapp group tentang penggunaan SMHKP maupun HC untuk produk perikanan yang akan diekspor ke Australia



Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan penerapan HACCP secara menyeluruh melalui kegiatan surveilen di UPI untuk penjaminan mutu produk sehingga tidak mengalami penolakan di anegara tujuan 2. Berkoordinasi dengan UPI maupun dengan petugas verifikator SMKHP dalam proses sertifikasi produk yang akan diekspor sehingga tidak terjadi kasus penolakan produk di negara tujuan 	<p>Timja Pengendalian dan Pengawasan Pasca Panen</p>

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
<p>Perubahan Aplikasi SISKARIN menjadi SIAP MUTU untuk sertifikasi SMHKP telah disosialisasikan kepada pelaku usaha pada Triwulan IV Tahun 2024 sehingga per 1 Januari 2025 telah menggunakan Aplikasi SIAP MUTU. Pelaku saha dalam proses sertifikasi produk tetap berkoordinasi dengan petugas untuk</p>	<p>Timja Pengendalian dan Pengawasan Pasca Panen</p>

pemenuhan persyaratan dokumen yang wajib diunggah pada aplikasi SIAP MUTU sehingga proses pencetakan SMKH dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan format SMKHP yang berlaku dan tidak ada kasus penolakan produk di negara tujuan.



Balikpapan, 10 April 2025
Kepala Balai KIPM Balikpapan

Eko Sulystianto

**REKAPITULASI EKSPOR IKAN DAN HASIL PERIKANAN YANG DITERIMA DI NEGARA TUJUAN EKSPOR
LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN**

Nama UPT : Balai KIPM Balikpapan
Periode / Tahun : Triwulan I / 2025

No.	Bulan	Jenis Produk	Negara Tujuan	Jumlah Sertifikat Ekspor	Jumlah Penolakan Produk Di Negara Tujuan
1	2	3	4	5	6
1	Januari	Udang, Windu, Udang Pink ,Kerapu Segar ,Bawal Putih ,Kakap, Tenggiri, Kuro, Udang Flower	China, Hong Kong, Japan, Malaysia, Singapore, Taiwan, United Kingdom (GB), United States Vietnam	129	0
2	Februari	Udang Windu, Udang Pink, Udang Putih, Kerapu Segar, Udang Vaname, Bawal Putih, Rumput Laut, Kakap, Udang Yellow, Kuro, Tenggiri, Udang CAT, Udang Flower, Kurisi	China, Hong Kong, Japan, Korea Selatan, Malaysia, Singapore, Taiwan, United Kingdom (GB), United States	147	0
3	Maret	Udang Windu, Udang Pink, Bawal Putih, Kerapu Segar, Udang Putih, Rumput Laut, Kakap, Kuro, Tenggiri, Udang Flower, Kurisi	China, Hong Kong, Japan, Korea Selatan, Malaysia, Singapore, Taiwan, United Kingdom (GB), United States	123	0
Total Sertifikat Ekspor Yang Diterima di Negara Tujuan				399	0



Balikpapan, 10 April 2025
Kepala Balai KIPM Balikpapan,

Eko Sulystianto

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK)
BALAI KIPM BALIKPAPAN**

NAMA INDIKATOR : PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN
UNTUK PERBAIKAN KINERJA
NAMA TIMJA : DUKUNGAN MANAJERIAL
PERIODE LAPORAN : TRIWULAN I / 2025

Nama Sasaran Kegiatan		: Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
Nama Indikator Kinerja		: Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja							
T / R	Tahun 2025							Capaian	Target
	Q1	Q2	SM. 1	Q3	Q4	SM. 2	Tahunan	Tahun 2025	Tahun 2025
Target	85%								85%
Realisasi	100%								
% Capaian	117,65%								

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4
SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2
SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan : Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya ?)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan pengawasan dalam mengelola data pemantauan tindak lanjut secara real time antara Inspektorat Jenderal dengan satker yang diperiksa melalui Sistem Informasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (SIDAK) adalah aplikasi berbasis Web.

Modul Aplikasi SIDAK (SISTEM INFORMASI DATA TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAAN APIP KKP) dirancang dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam menjalankan aplikasi, serta membantu Inspektorat Jenderal dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

Aplikasi SIDAK dapat diakses melalui url <https://sidak.kkp.go.id> Untuk akses yang optimal gunakan browser google chrome Saat mengakses url tersebut, Anda akan melihat langsung halaman login aplikasi

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

1. Dokumen yang telah dirilis atau diupload pada aplikasi SIDAK bersifat RAHASIA, dimohon untuk tidak mempublikasikan dokumen ini secara publik.
2. Profiling User Management (Profil Pengguna Aplikasi SIDAK) sangat diperlukan untuk mengetahui akses pengguna aplikasi SIDAK. Dengan adanya profil pengguna akan sangat membantu admin dalam melihat pengguna sesuai dengan akses yang telah ditetapkan. Hal ini untuk menjaga agar akses LHP tetap terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Dengan mengetahui data Pengguna, Admin dapat memetakan hak akses untuk setiap tingkatan unit kerja.

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target, jika tidak tercapai apa yang menjadi akar masalah (Mengapa hal tersebut terjadi ?)

1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan berfungsi untuk melihat data hasil laporan pengawasan yang telah diklasifikasikan pada beberapa bentuk dokumen LHP yang resmi diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal yaitu LHP bentuk BAB, Surat, Catatan Hasil Reviu ataupun Nota Dinas yang disampaikan kepada auditi dalam setiap kegiatan pengawasan.
2. Prosentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan berfungsi untuk menyajikan data prosentase tindak lanjut hasil pengawasan. Prosentase disajikan dalam diagram jarum jam yang merupakan capaian indikator kinerja TLHP. Jika capaian melebihi target 80% akan memunculkan status SUKSES berwarna hijau sebaliknya jika kurang dari 80% akan memunculkan status FAILED berwarna merah.
3. Temuan Hasil Pengawasan berfungsi untuk melihat jumlah temuan/kejadian hasil pengawasan. Temuan hasil pengawasan diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok temuan yaitu Kepatuhan, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, dan Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis
4. Jumlah Rekomendasi Pengawasan berfungsi untuk melihat jumlah rekomendasi/saran yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan. Temuan hasil pengawasan diklasifikasikan ke dalam 4 kategori rekomendasi sesuai dengan status rekomendasi Tuntas, Proses, Pending, Temuan hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD).
5. Nilai Temuan Keuangan berfungsi untuk melihat nilai temuan keuangan yang bersifat potensi kerugian keuangan negara yang berasal dari hasil kegiatan pengawasan. Pada fitur ini juga menampilkan nilai keuangan yang telah didindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sehingga menggambarkan prosentase tindak lanjut temuan keuangan.
6. Capaian indikator dihitung setiap terdapat kegiatan pengawasan pada satker

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto / dokumentasi

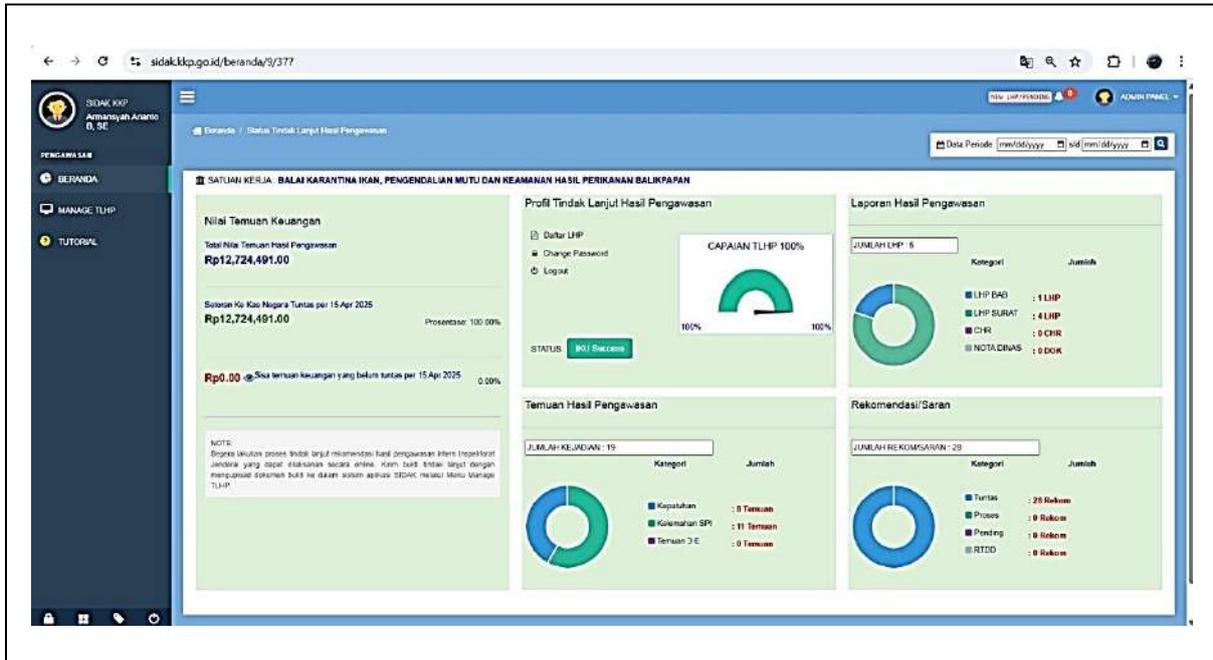
Profil TLHP yang menampilkan profil temuan dengan status TUNTAS warna HIJAU, PROSES warna ORANGE, PENDING warna MERAH.



The screenshot shows the TLHP profile page for the Directorate of Internal Control, Audit, and Evaluation of the Ministry of Finance. The page includes a search bar, a table of findings, and a summary of the results.

ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Monitor LHP	Tanggal Ditetapkan	Output Pengawasan	STATUS	Aksi
2484	BALAI KAPANTERBAH KEANEH PERKENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERKAWAN DAERAH	Evaluasi	T.19KSTJ.4MB.07K4.00029	2023-08-07	Hasil Pengawasan (LHP) Tahun 2023.08.07 (pada Masa Kewajiban dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Dok. SPN) dan Laporan	TUNTAS	Q Detail
2587	BALAI KAPANTERBAH KEANEH PERKENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERKAWAN DAERAH	Evaluasi	T.19KSTJ.4MB.07K4.00023	2023-08-10	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Publikasi Data Kelembagaan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Dok. SPN) dan Laporan	TUNTAS	Q Detail
1972	BALAI KAPANTERBAH KEANEH PERKENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERKAWAN DAERAH	Evaluasi	R.19KSTJ.4MB.07K4.00022	2022-04-05	Hasil Evaluasi dan Implementasi SA KP (pada Dulu Kelembagaan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Dok. SPN) dan Laporan Tahun 2022	TUNTAS	Q Detail
1278	BALAI KAPANTERBAH KEANEH PERKENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERKAWAN DAERAH	Audit	4B19KSTJ.4MB.1101K0021	2022-10-20	LAPORAN HASIL AUDIT KEBERLAKUKAN PROSEDUR DAN BAHAN TERA 2022-2021	TUNTAS	Q Detail
361	BALAI KAPANTERBAH KEANEH PERKENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERKAWAN DAERAH	Evaluasi	L.08.14KSTJ.4MB.1101K0020	2022-06-14	Profil Pelaksanaan Kegiatan Publikasi (PUB) di Balai KKP dan Pelaksanaan Proses Kelembagaan Terpadu	TUNTAS	Q Detail

Showing 1 to 5 of 5 entries



Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Memantau dan Menindak Lanjuti jika terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan pada aplikasi SIDAK	Timja Dukungan Manajerial

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Tidak ada temuan BPK pada tahun anggaran 2024	Timja Dukungan Manajerial



Balikpapan, 10 April 2025
Kepala Balai KIKM Balikpapan

[Handwritten Signature]
Eko Sulystianto

TANGKAP LAYAR APLIKASI SIDAK SATKER BALAI KIPM BALIKPAPAN TRIWULAN I TA. 2025

← → ↻ sidak.kkp.go.id/beranda/9/377

NEW LHP/PENDING 0 ADMIN PANEL

Beranda / Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Data Periode: mm/dd/yyyy s/d mm/dd/yyyy

SIDAK KKP
Armansyah Arianto
B, SE

PENGAWASAN
BERANDA
MANAGE TLHP
TUTORIAL

SATUAN KERJA : BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN

Nilai Temuan Keuangan

Total Nilai Temuan Hasil Pengawasan
Rp12,724,491.00

Setoran Ke Kas Negara Tuntas per 15 Apr 2025
Rp12,724,491.00 Prosentase: 100.00%

Rp0.00 Sisa temuan keuangan yang belum tuntas per 15 Apr 2025 0.00%

NOTE:
Segera lakukan proses tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektoriat Jenderal yang dapat dilaksanakan secara online. Kirim bukti tindak lanjut dengan mengupload dokumen bukti ke dalam sistem aplikasi SIDAK melalui Menu Manage TLHP.

Profil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Daftar LHP
Change Password
Logout

STATUS : **IKU Success**

CAPAIAN TLHP 100%

Temuan Hasil Pengawasan

JUMLAH KEJADIAN : 19

Kategori	Jumlah
Kepatuhan	: 8 Temuan
Kelemahan SPI	: 11 Temuan
Temuan 3-E	: 0 Temuan

Laporan Hasil Pengawasan

JUMLAH LHP : 5

Kategori	Jumlah
LHP BAB	: 1 LHP
LHP SURAT	: 4 LHP
CHR	: 0 CHR
NOTA DINAS	: 0 DOK

Rekomendasi/Saran

JUMLAH REKOM/SARAN : 28

Kategori	Jumlah
Tuntas	: 28 Rekom
Proses	: 0 Rekom
Pending	: 0 Rekom
RTDD	: 0 Rekom

 **SIDAK KKP**
Airmansyah Arianto
B, SE

PENGAWASAN

 **BERANDA**

 **MANAGE TLHP**

 **TUTORIAL**



Jumlah Laporan : 5 Dokumen **Tuntas : 28 Rekomendasi**
Jumlah Temuan : 19 Temuan **Proses : 0 Rekomendasi**
Jumlah Rekomendasi : 28 **Pending : 0 Rekomendasi**
Nilai Keuangan : Rp12,724,491 **Sisa Nilai Keuangan : Rp0**

Search:

ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Tanggal Register	Objek Pengawasan	STATUS	Aksi
2588	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALKIPAPAN	Evaluasi	T.178/ITJ.4HP.470/III/2023	2023-08-07	Hasil Evaluasi PNBP Tahun 2022-2023 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Balikpapan	TUNTAS	Q Detail
2587	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALKIPAPAN	Evaluasi	T.163/ITJ.4HP.430/III/2023	2023-08-10	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur	TUNTAS	Q Detail
1872	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALKIPAPAN	Evaluasi	R.76/ITJHP.440/IV/2022	2022-04-05	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Balikpapan Tahun 2022	TUNTAS	Q Detail
1278	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALKIPAPAN	Audit	4875/ITJHP.110/III/2021	2021-03-31	LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA PADA BKIPM BALKIPAPAN TA 2020-2021	TUNTAS	Q Detail
961	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALKIPAPAN	Evaluasi	1.09.14/ITJ.4HP.410/IK/2020	2020-08-14	Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Balai KIPM Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur	TUNTAS	Q Detail

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK)
BALAI KIPM BALIKPAPAN**

NAMA INDIKATOR : PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP
LINGKUP UPT BKIPM BALIKPAPAN
NAMA TIMJA : DUKUNGAN MANAJERIAL
PERIODE LAPORAN : TRIWULAN I / 2025

Nama Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
Nama Indikator Kinerja		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT BKIPM Balikpapan							
T / R	Tahun 2025							Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2025
	Q1	Q2	SM. 1	Q3	Q4	SM. 2	Tahunan		
Target	76%								76 %
Realisasi	100%								
% Capaian	120%								

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4
SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2
SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan : Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasinya
<ul style="list-style-type: none"> Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP Nilai Rencana Umum PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP / Pagu Pengadaan Barang Jasa x 100 % Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100 %, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target, jika tidak tercapai apa yang menjadi akar masalah (Mengapa hal tersebut terjadi ?)

1. Dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan tindak lanjut berupa identifikasi belanja pengadaan (PBJ) yang terdampak efisiensi belanja dan dapat dipastikan tidak dapat direalisasikan sehingga tidak diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Total sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan)
2. Balai KIPM Balikpapan telah melakukan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut. Sehingga, diharapkan dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP yang melebihi 100% (seratus persen)
3. Balai KIPM Balikpapan telah melakukan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut. Sehingga, diharapkan dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP yang melebihi 100% (seratus persen)
4. Dari file excel Form Klarifikasi Belanja PBJ Pasca Revisi Balai KIPM Balikpapan Pagu RUP Pasca Revisi (setelah efisiensi belanja) yang terumumkan tidak ada selisih maka RUP yang terumumkan di aplikasi **terkonfirmasi 100%**

Akar Masalah :

Dalam penilaian IKU RUP Biro Umum dan PBJ tidak mengeluarkan nilai per satker/UPT melainkan per eselon sehingga jika ada satker yg blum 100% capaian IKU RUP PBJ maka nilai capaian kinerja eselon menjadi kurang dari 100%. Terlampir dalam nota dinas penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto / dokumentasi

Penyampaian Rencana Umum Pengadaan Tahun 2025 pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)



Rekomendasi Renaksi untuk TW berikutnya	Penanggung Jawab
Koordinasi dengan satker/UPT BPPMHKP yang lain sehingga dapat mengumumkan RUP dengan kertas kerja klarifikasi yg sesuai (tidak ada selisih) sehingga nilai capaian dapat tercapai secara optimal sebesar 100 %	Timja Dukungan Manajerial

Hasil TL Rekomendasi Renaksi TW sebelumnya	Penanggung Jawab
-	Timja Dukungan Manajerial



Balikpapan, 10 April 2025
Kepala Balai KIPM Balikpapan

[Handwritten Signature]

Eko Sulystianto

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

Nomor : 2/SJ.7/TU.140/IV/2025

Yth. : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal
8. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
10. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
11. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal;

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025

Lampiran : 1 Berkas

Tanggal : 14 April 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya upaya optimalisasi kinerja Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan 1 tahun anggaran 2025 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan tindak lanjut berupa identifikasi belanja

pengadaan (PBJ) yang terdampak efisiensi belanja dan dapat dipastikan tidak dapat direalisasikan sehingga tidak diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Total sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) Satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tersebar pada 10 (sepuluh) unit eselon 1 telah melakukan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut. Sehingga, diharapkan dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP yang melebihi 100% (seratus persen).

Data yang terbentuk pada kertas kerja klarifikasi untuk nilai Pagu Terumumkan pasca efisiensi, nantinya setelah dilakukan penyesuaian oleh LKPP dan digunakan sebagai acuan untuk menjadi Pagu Pengadaan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sedangkan, revisi RUP yg dilakukan satker pada SIRUP akan membentuk data baru sebagai Pagu Terumumkan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sehingga, berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya sebagai berikut;

Formulasi pengukuran/penilaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP} \times 100\%}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}}$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Berikut data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025 pada setiap Unit Eselon 1;

No.	Nama Unit Eselon 1	Persentase RUP Terumumkan				% Capaian IKU TW 1
		Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	% RUP Terumumkan	
1	Inspektorat Jenderal	3,074,204,000.00	3,074,204,000.00	-	100.00%	100.00%
2	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	232,904,737,000.00	232,904,737,000.00	-	100.00%	100.00%
3	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	30,061,146,000.00	30,061,146,000.00	-	100.00%	100.00%
4	Sekretariat Jenderal	141,198,357,000.00	141,198,357,000.00	-	100.00%	100.00%
5	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	474,070,870,541.00	474,070,870,541.00	-	100.00%	100.00%
6	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	154,301,450,168.00	154,301,450,168.00	-	100.00%	100.00%
7	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan *	161,663,139,000.00	161,780,884,000.00	(117,745,000.00)	100.07%	99.93%
8	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **	688,474,617,688.00	688,285,621,000.00	188,996,688.00	99.97%	99.97%
9	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ***	42,318,573,722.00	42,715,615,722.00	(397,042,000.00)	100.94%	99.06%

Sebagai informasi, terdapat 6 (lima) satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memperoleh capaian persentase RUP Terumumkan tidak 100% (seratus persen), yang disebabkan oleh adanya LEBIH / KURANG TERUMUMKAN di dalam SIRUP, antara lain;

❖ **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

- 1) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung persentase 101,52%;

❖ **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

- 1) Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga persentase 139,11%;
- 2) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon persentase 94,75%;
- 3) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman persentase 79,56%;

❖ **Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

- 1) Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan persentase 105,75%.

Demikian kami sampaikan, atas atensi dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sofiyanto

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran
 Nomor : 2/SJ.7/TU.140/IV/2025
 Tanggal : 14 April 2025

Inspektorat Jenderal

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	INSPEKTORAT JENDERAL	12,922,581,000	9,848,377,000	3,074,204,000	0	3,074,204,000	100.00%
TOTAL		12,922,581,000	9,848,377,000	3,074,204,000	-	3,074,204,000	100.00%

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PKRL	261,203,332,000	104,939,270,000	156,264,062,000	0	156,264,062,000	100.00%
2	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT BPSPL PADANG	3,393,333,000	672,730,000	2,720,603,000	0	2,720,603,000	100.00%
3	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	6,375,019,000	3,458,788,000	2,916,231,000	0	2,916,231,000	100.00%
4	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	3,431,580,000	1,088,252,000	2,343,328,000	0	2,343,328,000	100.00%
5	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	19,995,766,000	5,319,309,000	14,676,457,000	0	14,676,457,000	100.00%
6	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	6,830,966,000	1,496,560,000	5,334,406,000	0	5,334,406,000	100.00%
7	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	34,247,947,000	7,929,570,000	26,318,377,000	0	26,318,377,000	100.00%
8	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	4,620,954,000	1,558,667,000	3,062,287,000	0	3,062,287,000	100.00%
9	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	25,399,451,000	6,130,465,000	19,268,986,000	0	19,268,986,000	100.00%
TOTAL		365,498,348,000	132,593,611,000	232,904,737,000	-	232,904,737,000	100.00%

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PDSPKP	115,520,273,000	92,739,078,000	22,781,195,000	0	22,781,195,000	100.0000%
2	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN	17,620,174,000	10,340,223,000	7,279,951,000	0	7,279,951,000	100.0000%
TOTAL		133,140,447,000	103,079,301,000	30,061,146,000	-	30,061,146,000	100.00%

Sekretariat Jenderal

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,747,944,000	1,244,617,000	3,503,327,000	0	3,503,327,000	100.0000%
2	BIRO UMUM dan PBJ SETJEN KKP	374,429,658,813	240,440,159,813	133,989,499,000	0	133,989,499,000	100.0000%
3	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	17,192,748,000	13,487,217,000	3,705,531,000	0	3,705,531,000	100.0000%
TOTAL		396,370,350,813	255,171,993,813	141,198,357,000	-	141,198,357,000	100.00%

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	58,884,712,000	31,737,714,000	27,146,998,000	-	27,146,998,000	100.0000%
2	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	22,397,487,000	10,811,525,000	11,611,482,000	-	11,611,482,000	100.0000%
3	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	10,478,712,000	5,480,294,000	4,998,418,000	-	4,998,418,000	100.0000%
4	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	15,964,411,000	7,870,111,000	8,094,300,000	-	8,094,300,000	100.0000%
5	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	15,435,966,000	7,386,800,000	8,049,166,000	-	8,049,166,000	100.0000%
6	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	10,922,447,000	5,112,980,000	5,809,467,000	-	5,809,467,000	100.0000%
7	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	13,079,571,000	5,664,854,000	7,414,717,000	-	7,414,717,000	100.0000%
8	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	4,664,595,000	2,736,731,000	1,927,864,000	-	1,927,864,000	100.0000%
9	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	5,053,928,000	2,164,272,000	2,889,656,000	-	2,889,656,000	100.0000%
10	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	10,127,563,000	4,966,733,000	5,160,830,000	-	5,160,830,000	100.0000%
11	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	9,469,004,000	4,613,193,000	4,855,811,000	-	4,855,811,000	100.0000%
12	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	6,938,438,000	4,125,531,000	2,812,907,000	-	2,812,907,000	100.0000%
13	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	11,918,263,000	5,179,650,000	6,738,613,000	-	6,738,613,000	100.0000%
14	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	7,324,563,000	3,248,807,459	4,075,755,541	-	4,075,755,541	100.0000%
15	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	554,406,885,000	187,773,216,000	366,633,669,000	-	366,633,669,000	100.0000%
16	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	11,579,998,000	5,728,781,000	5,851,217,000	-	5,851,217,000	100.0000%
TOTAL		768,646,543,000	294,601,192,459	474,070,870,541	-	474,070,870,541	100.00%

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,852,355,000	3,602,011,000	3,250,344,000	0	3,250,344,000	100.00%
2	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,734,269,000	766,079,000	968,190,000	0	968,190,000	100.00%
3	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	1,380,044,000	510,142,000	869,902,000	0	869,902,000	100.00%
4	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	2,713,372,000	945,404,000	1,767,968,000	0	1,767,968,000	100.00%
5	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	5,195,890,000	2,077,925,000	3,117,965,000	0	3,117,965,000	100.00%
6	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,884,926,000	2,455,714,000	4,429,212,000	0	4,429,212,000	100.00%
7	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	5,027,470,000	2,990,213,000	2,037,257,000	0	2,037,257,000	100.00%
8	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	3,699,357,000	1,360,567,000	2,338,790,000	0	2,338,790,000	100.00%
9	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	8,172,722,000	2,874,033,000	5,298,689,000	0	5,298,689,000	100.00%
10	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	12,977,451,000	7,284,745,000	5,692,706,000	0	5,692,706,000	100.00%
11	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	3,090,000,000	1,666,257,000	1,423,743,000	0	1,423,743,000	100.00%
12	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	5,871,421,000	3,366,137,000	2,505,284,000	0	2,505,284,000	100.00%
13	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	10,351,733,000	8,974,145,000	1,377,588,000	0	1,377,588,000	100.00%
14	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15,645,586,000	7,968,044,000	7,677,542,000	0	7,677,542,000	100.00%
15	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	5,353,114,000	3,899,339,000	1,453,775,000	0	1,453,775,000	100.00%
16	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	12,180,958,000	10,520,456,000	1,660,502,000	0	1,660,502,000	100.00%
17	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	11,198,948,000	9,407,506,000	1,791,442,000	0	1,791,442,000	100.00%
18	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	4,894,433,000	3,558,327,000	1,336,106,000	0	1,336,106,000	100.00%
19	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	6,430,703,000	5,176,541,000	1,254,162,000	0	1,254,162,000	100.00%
20	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	27,934,979,000	13,535,768,000	14,399,211,000	0	14,399,211,000	100.00%
21	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	17,719,192,000	8,500,585,000	9,218,607,000	0	9,218,607,000	100.00%
22	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	6,417,426,000	5,522,634,000	894,792,000	0	894,792,000	100.00%
23	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	5,483,764,000	3,178,854,000	2,304,910,000	0	2,304,910,000	100.00%
24	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	31,989,836,000	3,614,574,356	28,375,261,644	0	28,375,261,644	100.00%
25	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	6,682,838,000	4,489,408,476	2,193,429,524	0	2,193,429,524	100.00%
26	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	9,773,786,000	6,837,572,000	2,936,214,000	0	2,936,214,000	100.00%
27	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	1,706,542,000	546,606,000	1,159,936,000	0	1,159,936,000	100.00%
28	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	1,581,387,000	567,902,000	1,013,485,000	0	1,013,485,000	100.00%
29	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	4,037,436,000	2,328,361,000	1,669,707,000	0	1,669,707,000	100.00%
30	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	4,422,804,000	3,318,442,000	1,104,362,000	0	1,104,362,000	100.00%

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
31	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	4,834,550,000	2,324,153,000	2,510,397,000	0	2,510,397,000	100.00%
32	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	4,749,473,000	2,935,453,000	1,814,020,000	0	1,814,020,000	100.00%
33	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	4,516,869,000	3,401,264,000	1,115,605,000	0	1,115,605,000	100.00%
34	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	1,224,694,000	602,519,000	622,175,000	0	622,175,000	100.00%
35	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	3,963,035,000	2,414,682,000	1,548,353,000	0	1,548,353,000	100.00%
36	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	1,722,184,000	1,132,576,000	589,608,000	0	589,608,000	100.00%
37	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	1,776,770,000	780,782,000	995,988,000	0	995,988,000	100.00%
38	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	2,457,443,000	1,990,062,000	482,887,000	0	482,887,000	100.00%
39	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDMPK	37,408,305,000	21,099,518,000	16,308,787,000	0	16,308,787,000	100.00%
40	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	21,424,278,000	13,277,404,000	8,146,874,000	0	8,146,874,000	100.00%
41	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,793,500,000	2,050,631,000	1,742,869,000	0	1,742,869,000	100.00%
	TOTAL	340,775,885,000	186,450,572,832	154,301,450,168	-	154,301,450,168	100.00%

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	18,936,169,000	11,650,004,000	7,286,165,000	0	7,286,165,000	100.00%
2	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	16,984,790,000	11,649,012,000	5,385,164,000	0	5,385,164,000	100.00%
3	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	19,957,494,000	11,785,669,000	8,171,825,000	0	8,171,825,000	100.00%
4	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	24,383,171,000	10,392,543,000	13,990,628,000	0	13,990,628,000	100.00%
5	STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	8,828,253,000	4,830,075,000	3,998,178,000	0	3,998,178,000	100.00%
6	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO	22,623,261,000	16,093,548,000	6,529,713,000	0	6,529,713,000	100.00%
7	STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA	8,571,856,000	4,963,934,000	3,607,922,000	0	3,607,922,000	100.00%

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
8	STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON	10,673,580,000	6,260,613,000	4,412,967,000	0	4,412,967,000	100.00%
9	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA	18,995,926,000	13,172,220,000	5,823,706,000	0	5,823,706,000	100.00%
10	STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG	11,368,638,000	8,336,319,000	3,032,319,000	0	3,032,319,000	100.00%
11	STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK	10,548,291,000	6,522,652,000	4,025,639,000	0	4,025,639,000	100.00%
12	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM	21,481,831,000	12,683,680,000	8,798,151,000	0	8,798,151,000	100.00%
13	STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN	8,394,285,000	5,146,180,000	3,248,105,000	0	3,248,105,000	100.00%
14	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PSDKP	291,951,995,000	216,367,404,000	75,584,591,000	0	75,584,591,000	100.00%
15	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	24,072,394,000	16,304,328,000	7,768,066,000	117,745,000	7,885,811,000	101.52%
TOTAL		517,771,934,000	356,158,181,000	161,663,139,000	117,745,000	161,780,884,000	100.07%

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	6,552,158,000	2,941,461,000	3,610,697,000	0	3,610,697,000	100.00%
2	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	65,696,049,000	5,508,508,000	60,187,541,000	0	60,187,541,000	100.00%
3	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	6,403,317,000	3,276,664,000	3,126,653,000	0	3,126,653,000	100.00%
4	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	4,920,264,000	3,099,917,000	1,820,347,000	0	1,820,347,000	100.00%
5	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	3,715,487,000	703,996,000	3,011,491,000	0	3,011,491,000	100.00%
6	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	3,094,308,000	1,357,979,000	1,736,329,000	0	1,736,329,000	100.00%
7	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	3,609,688,000	1,986,038,000	1,623,650,000	0	1,623,650,000	100.00%
8	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	61,532,560,000	3,463,651,000	58,068,909,000	0	58,068,909,000	100.00%
9	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	2,976,153,000	1,558,921,000	1,417,232,000	0	1,417,232,000	100.00%
10	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	6,497,602,000	3,301,931,000	3,195,671,000	0	3,195,671,000	100.00%

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
11	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	3,817,270,000	1,582,763,000	2,234,507,000	0	2,234,507,000	100.00%
12	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	301,142,412,000	81,549,421,000	219,592,991,000	0	219,592,991,000	100.00%
13	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	6,367,671,000	3,959,325,000	2,408,346,000	0	2,408,346,000	100.00%
14	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	260,214,908,000	3,727,756,000	256,487,152,000	0	256,487,152,000	100.00%
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	5,691,813,000	2,885,497,000	2,806,316,000	0	2,806,316,000	100.00%
16	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	40,131,847,000	5,582,775,000	34,549,072,000	0	34,549,072,000	100.00%
17	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	4,741,886,000	3,397,358,000	1,344,528,000	0	1,344,528,000	100.00%
18	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	5,016,456,000	3,801,293,000	1,215,163,000	0	1,215,163,000	100.00%
19	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	8,285,054,000	1,787,024,000	6,498,030,000	0	6,498,030,000	100.00%
20	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	4,080,248,000	2,147,780,000	1,932,468,000	0	1,932,468,000	100.00%
21	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	6,263,656,000	2,516,166,200	3,747,489,800	0	3,747,489,800	100.00%
22	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	5,351,273,000	2,473,815,000	2,877,458,000	1,125,582,000	4,003,040,000	139.12%
23	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	5,110,199,000	2,895,155,112	2,215,043,888	(116,240,888)	2,098,803,000	94.75%
24	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	30,796,027,000	18,028,494,000	12,767,533,000	(2,609,427,000)	10,158,106,000	79.56%
	TOTAL	852,008,306,000	163,533,688,312	688,474,617,688	(1,600,085,888)	686,874,531,800	99.77%

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	BALAI KIPMHKP SURABAYA I	7,333,862,000	2,731,893,000	4,601,969,000	0	4,601,969,000	100.00%
2	BALAI KIPMHKP MEDAN I	3,610,142,000	1,382,357,000	2,227,785,000	0	2,227,785,000	100.00%
3	BALAI BESAR KIPMHKP MAKASSAR	4,273,547,000	2,159,240,000	2,114,307,000	0	2,114,307,000	100.00%
4	BALAI KIPMHKP DENPASAR	2,823,538,000	1,039,528,000	1,784,010,000	0	1,784,010,000	100.00%
5	STASIUN KIPMHKP BATAM	2,247,622,000	896,360,302	1,351,261,698	0	1,351,261,698	100.00%

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
6	STASIUN KIPMHKP PADANG	1,695,668,000	951,373,000	744,295,000	0	744,295,000	100.00%
7	STASIUN KIPMHKP PALEMBANG	1,536,305,000	848,465,000	687,840,000	0	687,840,000	100.00%
8	STASIUN KIPMHKP PONTIANAK	2,858,459,000	1,368,402,000	1,490,057,000	0	1,490,057,000	100.00%
9	BALAI KIPMHKP BALIKPAPAN	1,110,080,000	669,643,000	440,437,000	0	440,437,000	100.00%
10	BALAI KIPMHKP MANADO	3,933,678,000	2,221,985,000	1,711,693,000	0	1,711,693,000	100.00%
11	STASIUN KIPMHKP KENDARI	656,543,000	305,302,000	351,241,000	0	351,241,000	100.00%
12	BALAI KIPMHKP MATARAM	1,734,377,000	651,863,000	1,082,514,000	0	1,082,514,000	100.00%
13	BALAI KIPMHKP JAYAPURA	1,550,045,000	1,150,895,000	399,150,000	0	399,150,000	100.00%
14	STASIUN KIPMHKP MAMUJU	103,423,000	68,423,000	35,000,000	0	35,000,000	100.00%
15	STASIUN KIPMHKP KUPANG	989,490,000	930,680,000	58,810,000	0	58,810,000	100.00%
16	STASIUN KIPMHKP ACEH	1,914,801,000	879,607,000	1,035,194,000	0	1,035,194,000	100.00%
17	BALAI KIPMHKP BANJARMASIN	1,493,827,000	928,664,000	565,163,000	0	565,163,000	100.00%
18	STASIUN KIPMHKP PALU	454,470,000	420,370,000	34,100,000	0	34,100,000	100.00%
19	STASIUN KIPMHKP BENGKULU	1,174,326,000	737,555,000	436,771,000	0	436,771,000	100.00%
20	STASIUN KIPMHKP JAMBI	430,007,000	137,403,100	173,413,900	0	173,413,900	100.00%
21	STASIUN KIPMHKP PALANGKARAYA	1,118,531,000	453,628,000	664,903,000	0	664,903,000	100.00%
22	BALAI KIPMHKP SEMARANG	2,236,942,000	1,046,512,000	1,190,430,000	0	1,190,430,000	100.00%
23	STASIUN KIPMHKP GORONTALO	910,816,000	684,050,000	226,766,000	0	226,766,000	100.00%
24	BALAI KIPMHKP JAKARTA II	2,858,688,000	1,001,469,000	1,857,219,000	0	1,857,219,000	100.00%
25	STASIUN KIPMHKP MERAK	1,654,275,000	995,923,000	658,352,000	0	658,352,000	100.00%
26	STASIUN KIPMHKP PANGKAL PINANG	1,871,554,000	864,822,000	1,006,732,000	0	1,006,732,000	100.00%
27	STASIUN KIPMHKP MERAUKE	1,566,920,000	798,865,000	768,055,000	0	768,055,000	100.00%
28	STASIUN KIPMHKP SORONG	556,662,000	217,925,000	338,737,000	0	338,737,000	100.00%
29	STASIUN KIPMHKP YOGYAKARTA	1,414,763,000	604,480,000	810,283,000	0	810,283,000	100.00%
30	STASIUN KIPMHKP CIREBON	2,929,266,000	1,306,538,000	1,622,728,000	0	1,622,728,000	100.00%

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
31	BALAI KIPMHKP AMBON	1,659,694,000	1,031,308,000	628,386,000	0	628,386,000	100.00%
32	STASIUN KIPMHKP TERNATE	429,629,000	316,664,000	112,965,000	0	112,965,000	100.00%
33	BALAI UJI STANDAR KIPMHKP	6,408,384,000	3,693,415,000	2,714,969,000	0	2,714,969,000	100.00%
34	BALAI KIPMHKP TARAKAN	1,645,435,000	1,490,679,200	154,755,800	0	154,755,800	100.00%
35	STASIUN KIPMHKP PEKANBARU	2,140,551,000	1,748,549,000	392,002,000	0	392,002,000	100.00%
36	BALAI KIPMHKP LAMPUNG	1,470,733,574	525,392,250	945,341,324	0	945,341,324	100.00%
37	SEKRETARIAT BADAN KIPMHKP	44,427,679,000	37,526,741,000	6,900,938,000	397,042,000	7,297,980,000	105.75%
	TOTAL	117,224,732,574	74,786,968,852	42,318,573,722	397,042,000	42,715,615,722	100.94%



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sofiyanto

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM BALIKPAPAN

NAMA INDIKATOR : NILAI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN
 NAMA TIMJA : DUKUNGAN MANAJERIAL
 PERIODE LAPORAN : TRIWULAN I / 2025

Nama Sasaran Kegiatan		Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan							
Nama Indikator Kinerja		Nilai survei kepuasan masyarakat lingkup Balai KIPM Balikpapan							
T / R	Tahun 2025							Capaian	Target
	Q1	Q2	SM. 1	Q3	Q4	SM. 2	Tahunan	Tahun 2025	Tahun 2025
Target	88%								88
Realisasi	91,11%								
% Capaian	103.53%								

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4
 SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2
 SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4
 Tahunan : Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya ?)

Penyelenggaraan pelayanan publik memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

1. Perubahan organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, terjadi perubahan yang semula dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan, sehingga diperlukan sosialisasi terhadap stakeholder pada organisasi baru.

2. Tugas dan Fungsi yang diampu
Berdasarkan Permen KP No. 16 Tahun 2024 Tentang kewenangan pembinaan dan pengendalian dalam rangka penerbitan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, yang terdiri dari CPIB (penangan), CPIB (pembenihan), CBIB, CPIB (pembuatan pakan), CPOIB, CDOIB, SKP, PPMMT dan Penerapan Distribusi Ikan.
3. Sumber Daya Manusia
Berdasarkan tugas dan fungsi yang diampu oleh BPPMHKP saat ini terjadi kekurangan sumber daya manusia sehingga dalam pelaksanaannya tidak optimal.
4. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pada BPPMHKP kurang memadai
5. Anggaran pelaksanaan kegiatan
Efisiensi pemanfaatan anggaran berimbang pada tugas dan fungsi yang diampu

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan /kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/ dokumentasi

1. Melakukan kegiatan sosialisasi terkait perubahan organisasi, tugas dan fungsi serta hal hal lain yang berkaitan dengan organisasi BPPMHKP
2. Melakukan penataan sumber daya manusia berdasarkan analisa beban dalam menunjang tugas dan fungsi pada organisasi BPPMHKP
3. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan sehingga mendapatkan *feedback* dalam rangka peningkatan layanan terhadap masyarakat
4. Kombinasi metode pelaksanaan pengawasan dan pengendalian *onsite*, *self assesment* dan *remote assesment* dengan tidak mengurangi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan

Dokumentasi kegiatan :

Bukti dukung rincian kegiatan item 2 berupa **Surat Tugas Kepala Balai KIPM Balikpapan**, Nomor B. / BKIPM.BPN/ KP.440/ III /2025 tanggal 20 Maret 2024 tentang susunan keanggotaan tim kerja lingkup Balai KIPM Balikpapan



Ket : Sosialisasi perubahan organisasi dan pendampingan secara langsung pengisian SKM serta hasil IKM triwulan I 2025



Ket : Kombinasi metode pelaksanaan pengawasan dan pengendalian secara *remote assesment*



Ket : Kombinasi metode pelaksanaan pengawasan dan pengendalian secara *onsite*

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara langsung • Penentuan standar layanan • Refreshment petugas pelayanan publik 	Timja Dukungan Manajerial

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Koordinasi dengan Pemerintah Propinsi maupun Dinas Kab / Kota terkait penambahan layanan sertifikasi yang dilakukan di lingkup BKIPM Balikpapan berjalan dengan baik, diharapkan dari hal tersebut proses sertifikasi produk dan hasil kelautan perikanan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar	Timja Dukungan Manajerial

Balikpapan, 10 April 2025
Kepala Balai KIPM Balikpapan



Eko Sulystianto



LAPORAN

MONITORING EVALUASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN I



Tahun
2025



**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KALIMANTAN TIMUR**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN
TRIWULAN I TAHUN 2025



BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga Laporan Monitoring Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat/ Pelanggan Pada Triwulan I Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Monitoring Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat/ Pelanggan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan ini dimaksudkan untuk mengukur dan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/pelanggan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat/pelanggan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan. Diharapkan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan, peningkatan dan pengambilan kebijakan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan di masa yang akan datang, khususnya dilingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan.

Kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan guna perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Laporan Monitoring Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan Triwulan I Tahun 2025 Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan.

Balikpapan, 10 April 2025

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan

Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si
NIP. 197002111997031003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data.....	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM.....	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan).....	9
BAB IV	10
ANALISIS HASIL SKM	10
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan.....	10
4.2 Rencana Tindak Lanjut	10
4.3 Tren Nilai SKM.....	11
BAB V	13
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

- 4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;**
- 5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan**
- 6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.**

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner *online* melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/22> yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2025	8
2.	Pengumpulan Data	Januari-Maret 2025	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	April 2025	7
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	April 2025	7

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan IV tahun 2024, maka populasi penerima layanan pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan dalam kurun waktu triwulan IV tahun 2024 adalah sebanyak 35 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 32 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 70 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	63	90%
		Perempuan	7	10%
2	Usia	<25	1	1%
		25-45	32	46%
		46-60	34	49%
		>60	3	4%
3	Pendidikan	SD	13	19%
		SMP	3	4%
		SMA	51	73%
		D3	0	0%
		S1	2	3%
		S2	1	1%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	3	4%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	22	31%
		Pegawai Swasta	45	64%
		Wirausaha Non KKP	0	0%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%

		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	0	0%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	3	4%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	43	61%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	1	1%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	23	33%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,66	3,64	3,64	3,64	3,64	3,63	3,66	3,64	3,64
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	91,11 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Unsur layanan terendah yang didapatkan ialah Kompetensi Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,64.
2. Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu persyaratan dan perilaku pelaksana mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,66.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- "harus ditingkatkan kecepatan pelayanan penerbitan sertifikat".
- "proses penerbitan CBIB kedepannya bisa lebih mudah".

Adapun kondisi permasalahan/ kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun kendala jaringan dan kendala pada sistem aplikasi yang menghambat proses sertifikasi.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

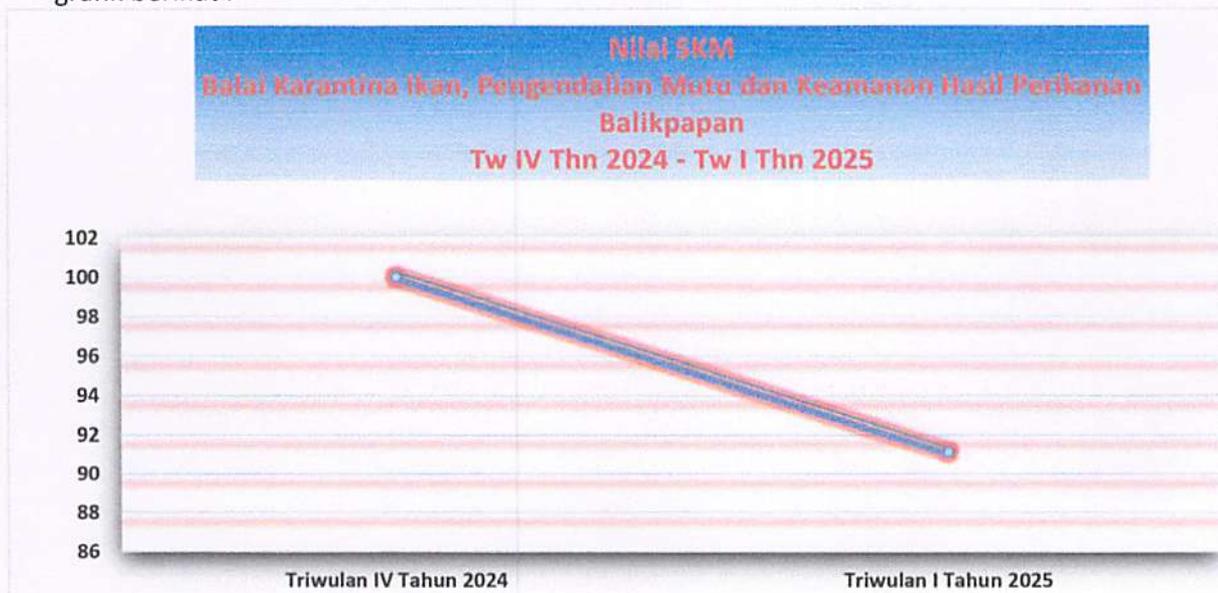
Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU) dan melakukan refreshment pelatihan pelayanan publik bagi petugas pelayanan, yang di laksanakan pada tanggal 15 April 2025 (Berita Acara terlampir). Penentuan perbaikan

direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek kurang dari 12 bulan. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan II 2025)			Penanggung Jawab
			April	Mei	Juni	
1	Kompetensi Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU dsb) • Refreshment pelatihan pelayanan publik bagi petugas pelayanan 	√			Tim Pelayanan Publik

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan tingkat kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode triwulan IV 2024 hingga triwulan I 2025 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan I mulai Januari hingga Maret 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 91,11. Kemudian nilai SKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan, menunjukkan penurunan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan IV 2024 hingga triwulan I 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu kompetensi pelayanan.
- Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi persyaratan dan perilaku pelaksana.

LAMPIRAN

1. Kuesioner Online

Data Layanan

412 Layanan

- 1. Berperan sebagai bagian integral dari program atau layanan, atau sebagai bagian dari proses bisnis yang mendukung keberhasilan organisasi.
- 2. Berperan sebagai bagian dari proses bisnis yang mendukung keberhasilan organisasi.
- 3. Berperan sebagai bagian dari proses bisnis yang mendukung keberhasilan organisasi.
- 4. Berperan sebagai bagian dari proses bisnis yang mendukung keberhasilan organisasi.
- 5. Berperan sebagai bagian dari proses bisnis yang mendukung keberhasilan organisasi.
- 6. Berperan sebagai bagian dari proses bisnis yang mendukung keberhasilan organisasi.
- 7. Berperan sebagai bagian dari proses bisnis yang mendukung keberhasilan organisasi.
- 8. Berperan sebagai bagian dari proses bisnis yang mendukung keberhasilan organisasi.
- 9. Berperan sebagai bagian dari proses bisnis yang mendukung keberhasilan organisasi.
- 10. Berperan sebagai bagian dari proses bisnis yang mendukung keberhasilan organisasi.

Data Responden

Waktu Tanya: 11 Feb 2025 13:11

Nama: _____

Jenis Kelamin: Perempuan Laki-laki

Jenis Pekerjaan: Pegawai Mahasiswa Lainnya

Usia: 15-20 Tahun 21-30 Tahun 31-40 Tahun 41-50 Tahun 51-60 Tahun

Pendidikan: SD SMP SMA S1

Profesi: Karyawan Dosen Lainnya

Pertanyaan

1. Bagaimana perasaan Anda tentang **kepercayaan** perusahaan yang Anda miliki dengan perusahaan tersebut yang ditunjukkan?

Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju

2. Bagaimana perasaan Anda tentang **kepercayaan** produk yang Anda miliki dengan perusahaan tersebut?

Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju

3. Bagaimana perasaan Anda tentang **kepercayaan** produk yang Anda miliki dengan perusahaan tersebut?

Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju

4. Bagaimana perasaan Anda tentang **kepercayaan** produk yang Anda miliki dengan perusahaan tersebut?

Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju

5. Bagaimana perasaan Anda tentang **kepercayaan** produk yang Anda miliki dengan perusahaan tersebut?

Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju

6. Bagaimana **kepercayaan** produk yang Anda miliki dengan perusahaan tersebut?

Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju

7. Bagaimana **kepercayaan** produk yang Anda miliki dengan perusahaan tersebut?

Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju

Kesimpulan

Hasil pengisian kuesioner online menunjukkan bahwa **kepercayaan** dan **persepsi** responden terhadap perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Waktu dan Lokasi: _____

Penutup

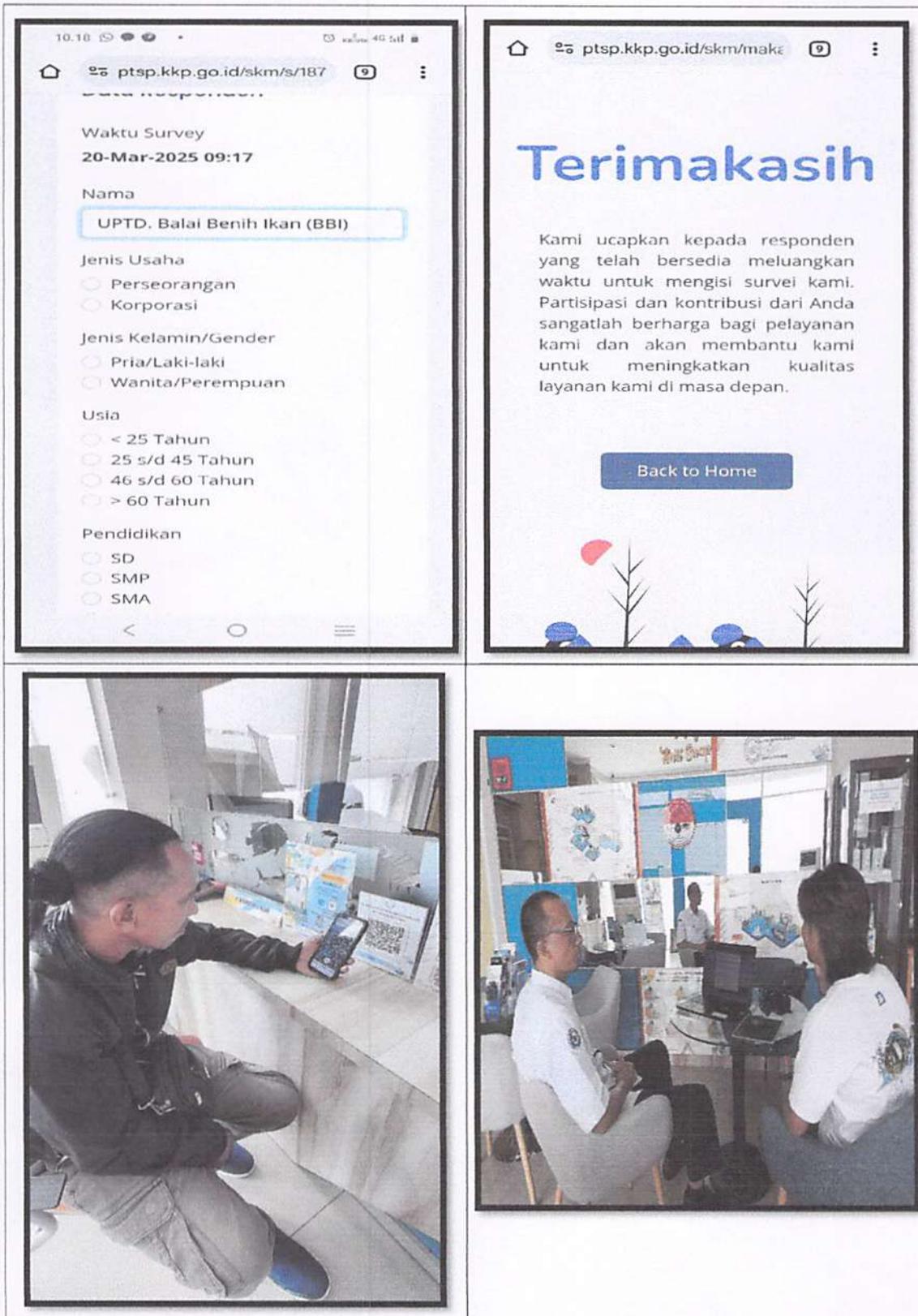
Terima kasih atas partisipasi Anda dalam pengisian kuesioner ini.

No	Katakteristik	Indikator	Jumlah	Presentase
Jenis kelamin	Laki laki		63	90%
	Perempuan		7	10%
Usia	kurang 25		1	1%
	lebih 60		3	4%
	25-45		32	46%
	46-60		34	49%
Pendidikan	SD		13	19%
	SMP		3	4%
	SMA		51	73%
	S1		2	3%
	S2		1	1%
Pekerjaan	P,UKKP		22	31%
	PNS		3	4%
	Swasta		45	64%
Jenis layanan	Penerbitan sertifikat cara budidaya ikan yang baik		23	33%
	Penerbitan sertifikat cara pembenihan ikan yang baik		1	1%
	Penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan (health certificate for fish and fishery products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekport)		43	61%
	Penjaminan penerapan program manajemen mutu terpadu/ hazard analysis and critical control point (PMMT/HACCP)		3	4%

No	Unsur Pelayanan	Aktual Masyarakat		
		Indeks Konversi	Mutu	Kinerja
1	Persyaratan	91,43	A	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	91,07	A	Sangat Baik
3	Waktu Penyelesaian	91,07	A	Sangat Baik
4	Biaya/ Tarif	91,07	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	91,07	A	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelayanan	90,71	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	91,43	A	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	91,07	A	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	91,07	A	Sangat Baik

No	Nilai Interval	Nilai Interval	Mutu	Konversi Unit
		Konversi	Pelayanan	Pelayanan
1	1,0000 - 2,5990	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,6000 - 3,0640	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0640 - 3,5320	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,0000	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM



Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Triwulan I Tahun 2025

Mutu Pelayanan :

91,11

Sangat Baik

Periode Survei : Januari s/d Maret 2025

Usia:

<25 : 1 Responden

25 - 45 : 32 Responden

46 - 60 : 34 Responden

>60 : 3 Responden

Pendidikan:

Sd : 13 Responden

SMP : 3 Responden

SMA : 51 Responden

Diploma : 0 Responden

S1 : 2 Responden

S2 : 1 Responden

S3 : 0 Responden



70 Responden



Unsur Pelayanan :

1 PERSYARATAN 3.66

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR 3.64

3 WAKTU PENYELESAIAN 3.64

4 BIAYA / TARIF 3.64

5 PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN 3.64

6 KOMPETENSI PELAKSANA 3.63

7 PERILAKU PELAKSANA 3.66

8 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN 3.64

9 SARANA DAN PRASARANA 3.64

kritik dan saran Anda sangat berharga bagi kami

#bppmhkp balikpapan YESS



@Bppmhkp Balikpapan



@Bppmhkp Balikpapan



@Bppmhkp Balikpapan



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN**

JALAN KOLONEL SYARIFUDDIN YOES RT.094 NO.10 BALIKPAPAN 76115

TELEPON (0542) 7581284

LAMAN www.kkp.go.id, SURAT ELEKTRONIK bkipmbalikpapan@kkp.go.id

SURAT TUGAS

**KEPALA BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN
NOMOR : B. 20 /BKIPM.BPN/KP.440/II/2025**

TENTANG

**PENUNJUKKAN TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT/PELANGGAN
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN BALAI KIPM BALIKPAPAN
TAHUN 2025**

**KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN BALIKPAPAN**

- Menimbang** :
- bahwa untuk mengetahui kinerja pelayanan yang diberikan oleh Balai KIPM Balikpapan kepada masyarakat dalam hal pelanggan/pengguna jasa KIPM, perlu dilakukan penilaian atas pendapat pelanggan/pengguna jasa terhadap pelayanan melalui penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi/pelaporan terhadap penyelenggaraan pelayanan;
 - bahwa untuk melakukan survei tersebut perlu dibentuk tim pengelola untuk melaksanakan tugas tersebut yang ditetapkan dalam Surat Tugas.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMBERI TUGAS

Menetapkan: Surat Tugas Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan Tentang Penunjukkan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai KIPM Balikpapan Tahun 2025

PERTAMA : Menunjuk pegawai Balai KIPM Balikpapan yang namanya tercantum dibawah ini sebagai tim Kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai KIPM Balikpapan Tahun 2025 dengan susunan:

Pembina/Pengarah	:	Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si
Ketua	:	Drh. Frederica Ethis M
Sekretaris	:	Novita, S.St.Pi
Anggota	:	Winda Anggraini, S.St.Pi Heri Supriadi Frederik Sanda Zainal, S.Pi

KEDUA : Uraian Tugas Tim Pelaksanaan Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan pada Balai KIPM Balikpapan sebagai berikut:

- 1. Pembina/Pengarah** : **Memberikan arahan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat agar dapat berjalan dengan baik**
- 2. Ketua** : **- Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan sistem yang ada**
- Membantu Penanggungjawab dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat
- 3. Sekretaris** : **- Mengumpulkan dan mengarsipkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat**
- Melakukan kompilasi dan pengolahan data operasional dalam rangka penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat
- Bertanggung jawab atas penyelesaian laporan Survei Kepuasan Masyarakat
- 4. Anggota** : **- Membantu pelaksanaan dan penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat**

- Melaksanakan tugas lain yang dibebankan kepadanya oleh pengarah kegiatan maupun ketua

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Balai KIPM Balikpapan Tahun Anggaran 2025, Nomor: SP DIPA-032 13.2.567610/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

KEEMPAT : Pelaksanaan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan dilakukan empat kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2025

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas tim bertanggung jawab kepada Kepala Balai KIPM Balikpapan

KEENAM : Surat Tugas ini berlaku pada sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan serta perbaikan seperlunya dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Lembar Pengesahan	
Jabatan	Paraf
Kasubbag Umum	<i>My</i>

Balikpapan, 2 Januari 2025
Kepala Balai KIPM Balikpapan,

Eko Sulystianto